

Edisi Khusus ■ 2017

Semai

Untuk Keadilan dan Demokrasi



PUSKESMAS



KLINIK



RUMAH SAKIT



BPJS KESEHATAN



BP PIPA JKN



Pusat Informasi
Pengaduan dan Advokasi
Jaminan Kesehatan Nasional





Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi didirikan pada 18 Mei 1998 di Jakarta. Koalisi Perempuan Indonesia menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (disabilitas), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup.

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi :

Dian Kartikasari, SH

Redaktur Pelaksana :

Bayu Sustiwi, Gabrella Sabrina

Liputan Khusus :

Gabrella Sabrina

Tim Redaksi :

Sutriyatmi, Indry Oktaviani, Linarti, Farida Indriani, Dewi Komalasari, Lia Anggiasih, Stephana S. Kono, Meidina Ingrid, Melda Imanuela, Ressa Ria, Dewi Yani, Tarsa Wiria, M. Nurul Huda

Sirkulasi dan Distribusi :

Dyah Bintarini, Yasinta Aisyah, Ariyanto, Aditya

Keuangan :

Liessya E., Sabriyah Suleman, Ria Nurbani, Emi Kartika, Dwi Hartini, Anissa Dinda

Desain/Layout :

Afriyanto Haribudi K.

.....

📍 : Jalan Siaga I No 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

☎ : (021) 79183221

✉ : sekretariat@koalisperempuan.or.id

🌐 : www.koalisperempuan.or.id

📘 : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

🗣 : @womencoalition

📷 : indonesiawomencoalition

PENGANTAR REDAKSI

Salam Keadilan dan Demokrasi,

Akhirnya SEMAI edisi Khusus 2017 bisa menemui pembaca dengan beragam ulasan, mulai dari Monitoring dan Evaluasi untuk memantau perkembangan Koalisi Perempuan Indonesia, Refleksi 2016 dan Catatan Awal Tahun 2017 "Menjaga Kebhinekaan, Demokrasi dan Perdamaian, Tantangan Serius bagi Indonesia 2017", hingga Rapat Kerja Nasional yang menghasilkan Standar Prosedur Operasional Pembayaran & Pengelolaan Uang Pangkal, Iuran & Sumbangan Anggota Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Dan Demokrasi.

Kemudian, SEMAI kali ini khusus bercerita tentang pengalaman anggota Koalisi Perempuan Indonesia dalam berorganisasi dan melakukan advokasi terkait PIPA JKN yang berada di balai perempuan wilayah Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah.

Ketika mendengar kata PIPA JKN, apa yang terlintas di benak pembaca? Mungkin pipa sebagai alat untuk menyalurkan air? Atau sebagai kader aktif Koalisi Perempuan Indonesia, pembaca sudah paham bahwa PIPA JKN yang dimaksud di sini adalah singkatan dari Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi (PIPA) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tak hanya itu, ada juga liputan Seminar Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia serta liputan Women March Jakarta yang merupakan gerakan di beberapa kota dunia salah satunya Jakarta, untuk mempromosikan hak-hak perempuan.

Selamat membaca, semoga terinspirasi dan semangat untuk berjuang demi keadilan dan demokrasi!

Redaksi menerima kiriman berita liputan & foto tentang kegiatan di wilayah, cabang dan balai perempuan. Silahkan kirim ke email sekretariat@koalisperempuan.or.id dengan subjek: Surat Pembaca SEMAI. Artikel dan foto yang dimuat akan mendapat hadiah souvenir menarik.

Didukung oleh



Daftar Isi

Edisi Khusus ■ 2017

2

PENGANTAR REDAKSI

CATATAN SEKRETARIS JENDERAL

4

5

MONITORING SEMESTER 2

CAWALU 2017 (DI MEDIA)

6

8

RAKERNAS 2017

HASIL-HASIL RAKERNAS 2017

9

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMBAYARAN
DAN PENGELOLAAN UANG PANGKAL, IURAN,
DAN SUMBANGAN ANGGOTA

11

16

LIPUTAN PIPA JKN

JAMBI

17

23

YOGYAKARTA

SULAWESI TENGAH

33

LIPUTAN SEMINAR PENTINGNYA KEADILAN
DAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

46

LIPUTAN WOMEN'S MARCH

49



Menjadi Organisasi yang Tertib dan Tanggap

Di Indonesia, hak untuk berserikat dan berorganisasi dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD1945) sebagai konstitusi negara dan undang-undang tentang yayasan ataupun Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Karenanya setiap tahun ada informasi tentang lahirnya beberapa organisasi baru. Tapi pada saat yang sama, setiap tahun, juga ada organisasi yang mati atau tinggal nama belaka, tanpa pengurus, tanpa sekretariat dan tanpa kerja nyata. Ini menandakan bahwa membangun organisasi adalah pekerjaan yang sangat mudah. Tetapi mempertahankan organisasi agar terus hidup, berkembang dan relevan dengan jaman, bukan pekerjaan mudah. Bahkan layak disebut, sangat sulit.

Pengalaman membuktikan, bahwa organisasi-organisasi masyarakat yang terus hidup dan tak lekang oleh jaman adalah organisasi yang anggota dan pengurusnya tertib berorganisasi dan tanggap terhadap perubahan serta harapan masyarakat.

Dian Kartikasari |
Sekretaris Jenderal
Koalisi Perempuan Indonesia



Tertib berorganisasi, yaitu menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dan pengurus, menggunakan mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan, melaksanakan aturan, nilai dan prinsip organisasi, bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kesamaan visi, serta memandirikan organisasi melalui penggalangan dana dari dalam dan luar organisasi, adalah kunci utama tegaknya organisasi.

Tanggap terhadap perubahan dan harapan masyarakat, sebagai indikator untuk mengukur apakah suatu organisasi masih relevan dengan perubahan yang tengah terjadi.

Semai edisi awal tahun ini, melaporkan sejumlah kegiatan antara lain pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Rapat Kerja Nasional dan hasil-hasilnya serta aturan organisasi tentang penggalangan dan pengelolaan uang pangkal, iuran dan sumbangan organisasi sebagai wujud dari tertib berorganisasi.

Semai edisi ini juga menyajikan sejumlah kegiatan Refleksi dan catatan awal tahun serta kegiatan Balai Perempuan di tiga Provinsi (Jambi, Yogyakarta dan Sulawesi Tengah) menjalankan fungsinya sebagai Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi, membuktikan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia telah dan tengah dihidupkan oleh kader dan pengurusnya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bersama-sama masyarakat mengatasi permasalahan tersebut.

Menjadi organisasi yang tertib dan tanggap, membuat Koalisi Perempuan Indonesia tetap hidup, tumbuh dan berkembang hingga kini, di usianya yang sebentar lagi mencapai 20 tahun.

MONITORING & EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari mekanisme organisasi, untuk memantau perkembangan organisasi. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koalisi Perempuan Indonesia menyebutkan bahwa Presidium Nasional, Presidium Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan dan Dewan Balai Perempuan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan hasil kongres, melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi.

Keputusan Presidium Nasional No.004/Int-Presnas/01/2010 Kebijakan Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia tentang Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Organisasi dan Program oleh Presidium Nasional terhadap Sekretariat Nasional ditentukan bahwa Rapat antara Presidium Nasional dan Sekretariat Nasional untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali. Berdasarkan keputusan inilah maka monitoring dan evaluasi (monev) oleh Presidium Nasional terhadap Sekretariat Nasional dilaksanakan.

Monev semester I tahun 2016 dilaksanakan pada 11-13 Agustus 2016. Tidak seperti biasanya, monev I/2016 ini tertunda satu bulan karena adanya hari raya Idul Fitri. Materi pembahasan monev I/2016 adalah melihat kemajuan organisasi dalam melaksanakan keputusan Rapat Kerja Nasional II/2016. Disamping itu, dalam monev ini juga dilakukan pembahasan Kerangka Kerja Rencana Strategis (Renstra) organisasi, serta rancangan awal Standar Prosedur Operasional.

Monev Semester II Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 16-18 Januari 2017. Agenda rapat monev II/2016 adalah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Semester II/2016, Pembahasan Draft SOP Iuran dan Draft Renstra, serta Rapat Pengurus Nasional Persiapan Rakernas. Dalam Monev II/2016 ini, pemantauan dan evaluasi tidak hanya melihat capaian Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, melainkan capaian organisasi secara keseluruhan, termasuk perkembangan wilayah, cabang dan balai perempuan.

CATATAN AWAL TAHUN 2017



Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menggelar CATATAN AWAL TAHUN (CAWALU) 2017, dengan tajuk *Refleksi 2016 dan Catatan Awal Tahun 2017: Menjaga Kebhinekaan, Demokrasi dan Perdamaian, Tantangan Serius Bagi Indonesia 2017* di Bakoel-Koffie, Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa 24 Januari 2017.

CAWALU 2017 ini menghadirkan 3 Narasumber yaitu : Dirga Ardiansyah (akademisi), Musda Mulia (ICRP) dan Dian Kartikasari (Koalisi Perempuan Indonesia).

REFLEKSI TAHUN 2016

Koalisi Perempuan Indonesia mencatat tiga bidang pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan, yaitu bidang ekonomi, bidang hukum dan bidang politik. Di bidang ekonomi, ada dua situasi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan yaitu melonjaknya harga sembilan bahan pokok (sembako) dan kelangkaan pangan dan penunjang pengolahan pangan antara lain kelangkaan cabai, gas ukuran 3 kg dan kedelai. Melonjaknya harga pangan dan kelangkaan bahan pangan serta pendukung pengolahan pangan mengakibatkan beban kerja perempuan dalam rumah tangga semakin meningkat. Disamping itu, perempuan juga mengalami peningkatan tekanan mental (*stress*) karena rendahnya pendapatan keluarga dan tingginya harga kebutuhan pokok.

Di bidang hukum, selama tahun 2016 terdapat tiga peristiwa penting, yaitu pembatalan sejumlah peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, yang telah membatalkan lebih dari 3.000 Peraturan Daerah (Perda), tetapi tidak membatalkan satu pun Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Peristiwa penting lainnya adalah adanya Perppu Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberlakukan pemberatan Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam bentuk hukuman mati dan hukuman kebiri. Koalisi Perempuan Indonesia memandang hukuman mati dan hukuman kebiri adalah hukuman yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, kedua hukuman tersebut juga berpotensi mengakibatkan tidak terkuaknya kejahatan seksual terhadap anak, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh orang dekat seperti ayah, paman, kakak dan orang terdekat lainnya dalam rumah tangga. Peristiwa hukum yang mengemuka di tahun 2016 adalah kecenderungan pembuat undang-undang menggunakan hukum agama (khususnya hukum Islam) dalam hukum nasional, seperti perluasan pengaturan zina dan pemberlakuan delik umum atau menghapus delik aduan dalam pasal perzinahan dalam RUU KUHP.

Ketentuan ini dapat mengakibatkan jutaan perempuan menjadi korban aturan hukum yang tidak adil karena jutaan perempuan mengalami praktek perkawinan tidak tercatat secara resmi menurut negara. Perempuan korban perkosaan yang tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa dirinya telah diperkosa, dapat dihukum pidana, karena pelakunya menyatakan bahwa hubungan mereka adalah hubungan seksual suka sama suka. Sedangkan peristiwa penting lainnya di bidang hukum yang masih dalam proses adalah adanya pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. RUU ini membutuhkan pengawalan agar secara materil dan formal melindungi pekerja migran perempuan dan keluarganya.

Di bidang politik, peristiwa penting yang mengemuka adalah penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) untuk pemenangan pemilihan kepala daerah. Peristiwa penting lainnya dan sangat mengkhawatirkan adalah maraknya seruan mengubah bentuk negara berdasarkan paham aliran agama tertentu serta menyerukan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi tidak sesuai dengan aliran agama tertentu. Dua peristiwa politik ini, mengancam kehidupan demokrasi sekaligus mengancam kebebasan fundamental perempuan dalam menikmati Hak Asasi Manusia, dan menempatkan perempuan dalam situasi rentan terhadap berbagai bentuk tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Peristiwa politik lain, yang perlu menjadi perhatian adalah menguatnya desakan beberapa partai politik untuk menggunakan sistem tertutup dalam pemilihan umum. Jika sistem ini diberlakukan, akan berakibat pada semakin kecilnya peluang kelompok perempuan untuk meningkatkan representasi politik perempuan.

CATATAN AWAL TAHUN 2017

Catatan penting tahun 2017 yang akan datang adalah pentingnya peran serta masyarakat dan kelompok perempuan untuk mengawal proses legislasi serta menyuarakan kebhinekaan dan demokrasi.

Pemerintah dan aparat keamanan harus mengambil peran utama untuk menyelamatkan keutuhan dan persatuan negara serta menjaga kebhinekaan dan demokrasi. Pemerintah dan aparat perlu melibatkan peran serta masyarakat untuk mencegah dan menangkal radikalisme melalui cara-cara damai serta sesuai aturan hukum.

RAKERNAS|2017



Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi kedua setelah Kongres Nasional. Rakernas 2017 diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Januari 2017, di Hotel Ambhara Jakarta, dengan fasilitator Wiladi Budiharga dan Titiek Kartika.

Rakernas 2017 diikuti oleh 79 orang yang terdiri dari pengurus nasional, pengurus wilayah dan pengurus cabang yang belum terbentuk wilayah serta staff sekretariat nasional. Dalam kegiatan ini dua sekretaris wilayah yang tidak hadir yaitu Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan Wilayah Sulawesi Tenggara. Sedangkan sekretaris cabang yang tidak hadir adalah Sekretaris Cabang Samarinda, Cabang Bandar Lampung, Cabang Kutai Karta Negara, dan Cabang Kabupaten Tangerang.

Pimpinan sidang dalam Rakernas 2017 ini adalah : Wilhelmina M. Dappa (Cabang Sumba Barat Daya), Indo Upe (Cabang Mamuju), Darwinih (Wilayah Jawa Barat), Juminarti (Wilayah Bengkulu) dan Maryati (Cabang Pontianak).

Hasil Rapat Kerja Nasional terdiri dari 9 dokumen yaitu :

1. Tatib Rapat Kerja Nasional III /2017
2. Tatib Pemilihan Pimpinan Sidang Tetap Rakernas III /2017
3. Laporan Pengurus Wilayah Dan Pengurus Cabang tahun 2016
4. Laporan Pengurus Nasional tahun 2016
5. Masalah-masalah Organisasi dan Solusinya
6. SPO Pembayaran dan Pengelolaan Uang Pangkal, Iuran dan Sumbangan Anggota KPI
7. SPO Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat
8. Analisa Kerangka Kerja Rencana Strategis 2014-2019 tahun 2017
9. Rencana Kerja Tahun 2017
10. Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Kongres Nasional V Tahun 2019

Keberlanjutan Organisasi

Pada saat pembahasan Kerangka Kerja Logis 2014-2019, dilakukan pembahasan tentang empat bagian penting dari Kerangka Kerja Strategis yang merupakan penjabaran dari mandat Kongres Nasional IV Tahun 2014, yaitu :

- 1) Advokasi reformasi kebijakan,
- 2) Organisasi dan kelembagaan,
- 3) Peningkatan kapasitas,
- 4) Keberlanjutan kemandirian dan mobilisasi sumber daya

Pada saat pembahasan keberlanjutan organisasi. Terutama membahas usaha-usaha organisasi untuk penggalangan dana dan mengembangkan kemampuan organisasi. Sebagian besar pengurus wilayah dan cabang menginformasikan bahwa banyak Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia yang memiliki unit usaha atau koperasi untuk mendukung anggotanya. Hal ini dapat dikembangkan menjadi strategi organisasi. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia akan mengembangkan Sekolah Politik, untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan serta untuk kemandirian organisasi.

Hasil Rakernas III /2017: PANITIA PENGARAH KONGRES NASIONAL V

Dalam Rapat Kerja Nasional III/2017 ini juga terpilih Panitia Pengarah (*Steering Committee-SC*) untuk Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia V yang akan diselenggarakan pada Desember tahun 2019. Hasil pemilihan Panitia Pengarah Kongres Nasional V disahkan dalam Surat Keputusan (SK) Rapat Kerja Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia No. 004/SK/RAKERNAS/III/I/2017.

Panitia Pengarah yang berjumlah 9 orang terdiri dari Perwakilan Pengurus Nasional, Perwakilan Region, dan Perwakilan Pendiri.

1. Steering Committee merupakan perwakilan dari :

- | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| a. Perwakilan Sumatra | : | Irna Riza Yuliasuti. | f. Pengurus Nasional | : | Nadlroh As Sariroh |
| b. Perwakilan Region Jawa | : | Hanifah Muyassarah | g. Sekretaris Jenderal | : | Dian Kartikasari |
| c. Perwakilan Region Sulawesi | : | Martina Majid | h. Sekretariat Nasional Ex Officio | : | Linarti |
| d. Perwakilan Region Sunda Kecil | : | Selly Ester Sembiring | i. Perwakilan Anggota sejak Pertama | | |
| e. Perwakilan Region Kalimantan | : | Nur Asikin Thalib | Koalisi Perempuan Indonesia berdiri: | | Antarini Pratiwi Arna |

2. Kriteria Panitia Pengarah (SC) adalah :

- a. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia
- b. Memahami teknis pelaksanaan Kongres Nasional
- c. Mampu menegakkan dan menginternalisasi nilai dan prinsip organisasi sehingga kongres tidak menjadi ajang politik pribadi, partai, perusahaan dan lembaga publik lain.
- d. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) yang kuat, mampu bekerja dalam tim, mampu bekerja dalam kondisi apapun, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menyelesaikan perbedaan pendapat, mampu memimpin forum dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
- e. Memiliki pengalaman mengelola pertemuan di tingkat nasional dan atau provinsi.
- f. Memiliki pengalaman membangun relasi dan menggalang dana yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai organisasi
- g. Memiliki komitmen untuk menghadiri setiap rapat koordinasi *steering committee*.

3. Tugas Panitia Pengarah (SC) adalah:

- a. Membuat Kerangka Acuan Pemilihan dan Kongres (Latar belakang, tema, tujuan *output*) dan materi-materi yang berkaitan dengan pemilihan dan kongres.
- b. Menyusun draft Tata Tertib Kongres dan Tata Cara Pemilihan Sekretaris Jenderal dan Presidium Nasional.
- c. Mensosialisasikan tata cara pemilihan ke Wilayah, Cabang dan Balai Perempuan.
- d. Mengarahkan, memastikan tata tertib kongres dan tata tertib pemilihan yang disepakati berfungsi sebagaimana mestinya dengan berkoordinasi dengan panitia pelaksana (OC)
- e. Melakukan seleksi kepada calon-calon sekretaris jenderal dan presidium nasional sesuai dengan kriteria pemilihan.
- f. Memimpin sidang pembahasan tata tertib kongres nasional, tata tertib pemilihan pimpinan sidang dan pelaksanaan pemilihan pimpinan sidang dalam kongres nasional.
- g. Menetapkan lokasi penyelenggaraan Kongres
- h. Memantau jalannya persidangan
- i. Menjaga peserta selalu menggunakan tata tertib persidangan yang telah disepakati dalam pengambilan keputusan demi kelancaran jalannya persidangan
- j. Membangun relasi dan menggalang sumber-sumber pendanaan
- k. Melakukan evaluasi terhadap pemilihan dan pelaksanaan kongres bersama OC
- l. SC bertanggung jawab atas terselenggaranya kongres sesuai dengan nilai dan prinsip organisasi
- m. SC bertanggungjawab memastikan kepesertaan Kongres sesuai AD/ART Dalam SK No 004/SK/RAKERNAS/III/I/2017 tentang Panitia Pengarah (Steering Committee-SC) Kongres Nasional V juga diatur bahwa SC yang mengajukan diri sebagai salah satu kandidat pengurus nasional, maka yang bersangkutan harus melepas jabatan sebagai anggota SC dan akan dilakukan penggantian antar waktu. SC yang akan mengundurkan diri sebagai SC harus berkonsultasi dan memperoleh persetujuan dari entitas yang diwakilinya. Penggantian SC yang mengundurkan diri dilakukan berdasarkan entitas yang diwakilinya.

**Hasil Rekernas III/2017:
SPO IURAN DAN SUMBANGAN ANGGOTA**

LAMPIRAN
SK RAKERNAS NO : 02/SK/RAKERNAS/III/I/2017
PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG PANGKAL, IURAN DAN SUMBANGAN

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG PANGKAL,
IURAN DAN SUMBANGAN ANGGOTA
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan dan Demokrasi**

A. Pengertian Umum

1. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia adalah perempuan Indonesia yang setuju dengan visi, misi, nilai dan prinsip organisasi, mendaftarkan diri dan diterima sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia.
2. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia terdiri dari :
 - a) Anggota penuh adalah mereka yang berusia diatas 18 tahun.
 - b) Anggota muda adalah mereka yang berusia 15-18 tahun.
3. Uang pangkal adalah sejumlah uang dan atau barang dengan nilai uang yang sama, yang wajib dibayarkan satu kali saat perempuan mendaftar sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia.
4. Iuran anggota adalah sejumlah uang dan atau barang dengan nilai uang yang sama, yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota Koalisi Perempuan Indonesia.
5. Sumbangan adalah uang, atau barang atau fasilitas yang diberikan oleh anggota dan atau bukan anggota, perorangan atau badan hukum kepada organisasi yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
6. Pengelolaan Keuangan adalah seluruh kegiatan pencatatan asset, pencatatan dan pelaporan pemasukan, pengeluaran, penggunaan uang untuk mencapai tujuan organisasi
7. *Standard Operational Procedure* atau SPO adalah standar yang digunakan untuk mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu.

B. Tujuan penyusunan SPO

Standard Operational Procedure atau SPO tentang pembayaran dan pengelolaan uang pangkal dan iuran anggota ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadi pegangan anggota dalam melakukan pembayaran uang pangkal dan iuran anggota.
2. Menjadi pegangan pengurus organisasi di semua tingkatan dalam melakukan pengelolaan uang pangkal dan iuran anggota.
3. Menjadi pegangan bagi kader organisasi yang akan menjelaskan mengenai pembayaran dan pengelolaan uang pangkal dan iuran anggota, baik kepada calon anggota, anggota, pengurus dan pihak ketiga yang memerlukan informasi mengenai sumber-sumber keuangan organisasi.
4. Melaksanakan mandat organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD /ART) Koalisi Perempuan Indonesia.

C. Dasar Hukum Penyusunan SPO

1. Anggaran Dasar Bab VII tentang Keuangan dan Kekayaan Organisasi, Pasal 22 tentang Sumber Keuangan berbunyi sumber keuangan organisasi diperoleh dari :
 - a) Uang pangkal dan iuran anggota,
 - b) Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Koalisi Perempuan Indonesia,
 - c) Hasil usaha-usaha yang sah.
2. Anggaran Rumah Tangga Bab IX tentang Keuangan dan Kekayaan Organisasi, Pasal 63 tentang Sumber, Distribusi dan Pengelolaan Keuangan berbunyi :
 - 1) Sumber keuangan adalah :
 - a. Uang pangkal adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota pada saat mendaftar menjadi anggota.
 - b. Iuran anggota adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan oleh anggota pada pengurus Balai Perempuan tempat dirinya terdaftar.
 - c. Besarnya uang pangkal dan iuran akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Nasional.
 - d. Koalisi Perempuan Indonesia tidak menerima dana yang bertentangan dengan asas, nilai-nilai, prinsip dan tujuan organisasi, antara lain dana utang, perusahaan, institusi atau perorangan termasuk partai politik dan badan hukum yang merusak lingkungan, melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
 - e. Koalisi Perempuan Indonesia dimungkinkan untuk memiliki badan usaha yang tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
 - f. Syarat-syarat dan mekanisme penggalangan dana akan diatur lebih lanjut dalam *Standard Operational Procedure* (SOP).
 - 2) Distribusi penerimaan uang pangkal dan iuran anggota :
 - a. Balai Perempuan sebesar 50% (limapuluh persen)
 - b. Cabang sebesar 20% (dua puluh persen)
 - c. Wilayah sebesar 20% (dua puluh persen)
 - d. Nasional sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 3) Pengelolaan keuangan organisasi berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK).

D. Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Uang Pangkal Anggota
 - a. Setiap orang yang mendaftar menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia wajib membayar uang pangkal anggota sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Uang pangkal dibayarkan kepada pengurus Balai Perempuan dan atau struktur lain di tempat pertama kali mendaftarkan diri sebagai anggota.
 - c. Uang pangkal hanya dibayarkan satu kali selama menjadi anggota.
 - d. Pengurus Balai Perempuan atau struktur lain, diberi keleluasaan untuk mengatur tata cara pembayaran uang pangkal bagi anggota yang tidak mampu melakukan pembayaran uang pangkal sekaligus.
 - e. Pembayaran uang pangkal harus dicatat dalam buku catatan keuangan organisasi dan kartu iuran anggota.

2. Iuran Anggota

- a. Iuran anggota wajib dibayarkan oleh setiap anggota Koalisi Perempuan Indonesia
- b. Besaran iuran anggota antara Rp 2.000,00 sampai dengan Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah sampai dengan lima ribu rupiah) setiap anggota per bulan.
- c. Besaran iuran anggota ditentukan dalam rapat anggota di Balai Perempuan dengan prinsip tidak memberatkan semua anggota yang wajib membayarkannya.
- d. Iuran anggota dibayarkan melalui pengurus Balai Perempuan dimana yang bersangkutan terdaftar dan atau kepada pengurus Cabang tempat anggota terdaftar jika yang bersangkutan belum terdaftar di Balai Perempuan manapun.
- e. Pengurus Balai Perempuan dan Pengurus Cabang yang menerima dan mengumpulkan iuran wajib mencatat setiap iuran yang diterima dalam :
 - i. Buku catatan keuangan (Buku Kas) yang mencatat setiap penerimaan dari sumber iuran anggota disertai nama dan data pembayar iuran dengan jelas.
 - ii. Kartu iuran anggota yang dimiliki oleh setiap anggota.

3. Kartu iuran anggota, dapat berbentuk kartu atau buku iuran. Format Kartu dibuat sesuai format kartu iuran sebagaimana lampiran Standar Prosedur Operasional ini, atau dibuat sendiri, yang sekurang-kurangnya isinya sesuai dengan format yang ditentukan

4. Apabila di area kerja dimana belum terbentuk balai perempuan, anggota menyetorkan uang pangkal dan iuran anggota ke sekretariat cabang dan dilakukan pencatatan dengan cara yang sama.

5. Apabila di area kerja dimana belum terbentuk Balai Perempuan dan Cabang, anggota menyetorkan uang pangkal dan iuran anggota ke Sekretariat Wilayah dan dilakukan pencatatan dengan cara yang sama.

6. Apabila di area kerja dimana belum terbentuk Balai Perempuan, Cabang dan Wilayah, anggota menyetorkan uang pangkal dan iuran anggota ke Sekretariat Nasional dan dilakukan pencatatan dengan

cara yang sama.

7. Apabila situasi dalam point (4), (5) dan (6) terdapat focal point organisasi maka dapat disepakati untuk penyetoran dan pengelolaan uang pangkal dan iuran anggota melalui focal point tersebut.

8. Apabila anggota membayar uang pangkal dan atau iuran anggota melalui transfer bank, maka sekretariat atau pengurus yang bersangkutan wajib melakukan pencatatan sesuai dengan sistem pencatatan keuangan organisasi.

9. Apabila anggota membayar uang pangkal dan atau iuran anggota melalui transfer bank maka sekretariat atau pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada anggota tersebut bahwa uang pangkal atau iuran anggota telah diterima. Pemberitahuan ini disertai dengan kwitansi penerimaan pembayaran tersebut. Pemberitahuan dan kwitansi dapat disampaikan secara langsung atau melalui email /foto yang dikirimkan melalui telepon.

E. Mekanisme pengelolaan uang pangkal dan iuran anggota

1. Uang pangkal dan iuran anggota dicatat dalam pembukuan keuangan organisasi sebagai bagian dari sumber keuangan organisasi yang tidak terpisah dari sumber keuangan yang lain.
2. Iuran anggota dibayarkan setiap bulan satu kali, pada saat pertemuan bulanan Balai Perempuan dan/atau dibayarkan kepada pengurus atau kader yang bertugas untuk menerima pembayaran yang dimaksud, yaitu kader/CO/pengurus yang bertugas untuk keliling Balai Perempuan sebagai pengumpul iuran sekaligus melakukan pertemuan informal dengan anggota. Jika pembayaran dengan model pengumpulan keliling maka petugas harus membawa buku catatan keuangan untuk mencatat semua penerimaan Petugas penerima uang/iuran wajib memberikan bukti pembayaran kepada pembayar uang iuran.

3. Penghitungan jumlah total uang pangkal dan iuran anggota dan distribusi sesuai dengan aturan di atas dilakukan setiap 3 bulan sekali.
4. Jumlah uang yang diterima dari uang pangkal dan iuran anggota didistribusikan kepada tiap tingkatan pengurus sesuai dengan aturan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab IX Pasal 63 ayat 2 yaitu :
 - a. Balai Perempuan sebesar 50% (lima puluh persen)
 - b. Cabang sebesar 20% (dua puluh persen)
 - c. Wilayah sebesar 20% (dua puluh persen)
 - d. Nasional sebesar 10% (sepuluh persen)dari sumber-sumber lain yang dikelola organisasi.
5. Apabila di area kerja organisasi belum terbangun struktur Balai Perempuan maka alokasi iuran anggota untuk balai perempuan dapat dikelola oleh Sekretariat Cabang di area tersebut.
6. Apabila di area kerja organisasi belum terbangun struktur Cabang maka alokasi iuran untuk Cabang dikelola oleh Sekretariat Wilayah di area tersebut.
7. Apabila di area kerja organisasi belum terbangun struktur Wilayah maka alokasi iuran untuk wilayah dikelola oleh Sekretariat Nasional.
8. Seluruh penggunaan uang pangkal dan iuran anggota **wajib dilaporkan** oleh pengurus **di dalam laporan keuangan organisasi** bersama dengan uang dari sumber-sumber lain yang dikelola organisasi.

F. Penggunaan uang pangkal dan iuran anggota

1. Uang pangkal dan iuran anggota digunakan untuk membiayai kebutuhan organisasi di masing-masing tingkatan seperti pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), fotocopy, biaya komunikasi, biaya pertemuan, biaya pendidikan kader berjenjang, biaya pelatihan-pelatihan, biaya Rembug Balai Perempuan/Konferensi Cabang/Kongres Wilayah/Kongres Nasional, biaya kampanye, biaya lobby kebijakan dan kegiatan organisasi lain yang mendukung upaya mencapai visi misi organisasi.
2. Apabila disepakati oleh anggota dalam pengelolaan uang pangkal dan iuran anggota ini juga dapat dialokasikan biaya sosial untuk anggota seperti uang untuk menyumbang anggota yang sakit, melahirkan, terkena bencana dan sejenisnya.
3. Apabila disepakati oleh anggota dalam pengelolaan uang pangkal dan iuran anggota ini juga dapat dialokasikan untuk dana awal pembentukan koperasi dan atau *credit union* atau usaha lain untuk menunjang keberlanjutan organisasi dan kesejahteraan anggota.

G. Sumbangan anggota

1. Selain uang pangkal dan iuran anggota di atas, organisasi diperbolehkan menerima sumbangan dari anggota.
2. Sumbangan dari anggota tersebut tidak boleh dalam perjanjian tertentu dan atau hal-hal lain yang melanggar AD/ART organisasi, mengakibatkan penyalahgunaan organisasi, dan/atau tindakan yang bertentangan dengan hukum negara.
3. Besarnya sumbangan dari 1 orang anggota tidak boleh lebih dari 25% dari total uang yang dikelola organisasi dengan berbagai sumber yang lain.
4. Pencatatan penerimaan sumbangan anggota, penggunaan dan pelaporannya diperlakukan sama dengan mekanisme pencatatan, penggunaan dan pelaporan uang pangkal dan iuran anggota.

Lampiran
Format Kartu Iuran Anggota



Nomor Induk Anggota

**KARTU IURAN ANGGOTA
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI**

Nama :
 Kelompok Kepentingan :
 Balai Perempuan :
 Cabang :
 Wilayah :

No.	Tanggal	Jumlah Iuran	Tanda Tangan Penyetor	Tanda Tangan Penerima
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

PIPA JKN

BALAI PEREMPUAN SEBAGAI PIPA JKN

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan rakyatnya, Koalisi Perempuan Indonesia turut memperjuangkan hak kesehatan dan hak atas pemenuhan pelayanan kesehatan dengan menyusun strategi advokasi berbasis data dengan melakukan riset aksi.

Tak hanya itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga membangun Balai Perempuan (BP) sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi (PIPA) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada akhirnya data kasus digunakan sebagai bukti untuk melengkapi hasil riset aksi serta akan mendukung advokasi JKN di berbagai level struktur pemerintahan mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Redaksi SEMAI mendapat kesempatan untuk meliput balai-balai perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi di wilayah Jambi, Sulawesi Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Balai Perempuan PIPA JKN akan memberikan informasi JKN, melakukan pendampingan kasus dan mendata kasus-kasus JKN di tingkat desa. Selanjutnya data kasus akan dikirim ke pengurus cabang, wilayah, dan nasional.

PIPA JKN di Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jambi

Di Jambi, Balai Perempuan PIPA JKN dibangun sebanyak 3 desa di setiap cabang/kabupaten. Adapun tiga desa yang menjadi BP PIPA JKN adalah

- BP PIPA JKN Mahkota, Desa Tenam, Kabupaten Batanghari
- BP PIPA JKN Sejahtera, Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi
- BP PIPA JKN Bangun Karya, Desa Bangun Karya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Setiap Balai Perempuan memiliki pengalaman dan cerita menarik dalam melakukan upaya mendukung masyarakat untuk memperoleh Akses Kesehatan.



Sosialisasi PIPA JKN

BP PIPA JKN MAHKOTA, DESA TENAM, KABUPATEN BATANGHARI

Menjadi anggota Balai Perempuan PIPA JKN berarti menjadi pusat yang akan menerima informasi dari desa hingga nasional. Selayaknya, program PIPA JKN memberi pembelajaran pada anggota balai perempuan mengenai advokasi berbasis data. Anggota BP PIPA JKN dapat belajar mulai dari mendata pengaduan masyarakat mengenai Jaminan Kesehatan Nasional hingga membantu masyarakat sampai mendapat hak kesehatan.

Sebelumnya Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jambi telah melakukan temu jejaring mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, *“temu jejaring juga dihadiri ibu wakil bupati dan beliau merespon sekali dan mengajak bekerjasama, kemudian mari kita tindak lanjuti bersama,”* ujar Desi, staf Penguatan Organisasi wilayah Jambi.

Balai Perempuan Mahkota, Desa Tenam, Kabupaten Batanghari telah melakukan kerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) desa. Siti Lambreta, Koordinator Penyakit Tidak Menular Puskesmas Tenam menyatakan bahwa dirinya pernah mendapat pengaduan dan bekerja sama dengan Balai Perempuan Mahkota untuk membantu pendaftaran Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). *“Saya dapat informasi, bahwa ada anak SD (WD) digigit anjing. Ternyata korban tidak mempunyai kartu JKN untuk berobat. Setelah dibantu akhirnya Widi mendapat akses JAMKESDA dan dapat pelayanan gratis, hingga pelayanan kesehatan berikutnya dia disuntik anti rabies di Puskesmas Tenam,”* kata Siti. Lambreta.

“Ibu-ibu di Balai Perempuan PIPA JKN ini menjadi ujung tombak, ketika pola kerja di Desa Tenam sudah bagus nanti akan menjadi contoh di balai-balai perempuan lainnya. Balai Perempuan harus punya simpati dan empati. Mengurus desa bukan hanya tugas kepala desa namun masalah kita bersama sebagai manusia, kita belajar bermitra dengan dengan berbagai pihak mulai dari kepala desa, petugas BPJS, hingga polisi,” ujar Rustiyati

Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Lanjut Usia, sekaligus sebagai pembimbing BP PIPA JKN wilayah Jambi memberi semangat kepada anggota BP Mahkota, Desa Tenam, Kabupaten Batanghari.

KERJASAMA BP MAHKOTA DENGAN PUSKESMAS



PIPA JKN Balai Perempuan Mahkota sempat membantu akses kesehatan untuk Riyanti, anak perempuan usia 9 tahun ini mengidap tumor ginjal.

Siti Lambreta | Koordinator Penyakit Tidak Menular Puskesmas Tenam

Pada 30 November 2016 Balai Perempuan Mahkota mendapatkan pemeriksaan IVA (Internal Visual Asam Asetat) untuk mendeteksi penyakit kanker rahim, “untuk pemeriksaan IVA, dananya berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dana ini selain untuk IVA, bisa digunakan untuk anak kekurangan gizi, ibu hamil, serta masalah kesehatan ibu dan balita,” lanjut Siti Lambreta.

Dana kesehatan untuk perempuan Desa Tenam dikelola di Pokja IV PKK, yaitu Kelompok Kerja yang menangani program tentang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. “Di desa kami, sudah ada anggaran desa untuk kesehatan perempuan. Ketika merencanakan penganggaran di desa, tentunya melibatkan Puskesmas dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),” kata Siti Lambreta.

Perjuangan Balai Perempuan Mahkota sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA JKN), tidaklah mudah. Untuk menangani satu kasus pengaduan, mereka harus mendatangi beberapa instansi, dari mulai kantor desa untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), selanjutnya harus ke Dinas

Kesehatan, Dinas Sosial, bahkan sampai ke Balai Kota dan ke DPRD. Namun rasa lelah dari jerih payah memperjuangkan layanan kesehatan, terasa terbayar, saat melihat warga masyarakat yang dibantu dapat terselamatkan. Tetapi, bila masyarakat yang dibantu PIPA JKN akhirnya meninggal, rasa sedih dan pilu, terasa terus tinggal di dalam benak relawan PIPA JKN.

PIPA JKN Balai Perempuan Mahkota sempat membantu akses kesehatan untuk anak perempuan (R), usia 9 tahun mengidap tumor ginjal. “R, masih di kelas 3 Sekolah Dasar. Saat kami bantu setahun ini perutnya sudah besar dan tak bisa dioperasi. Kami turut mengupayakan agar dia dapat menjalani pengobatan di Jakarta. Dengan dukungan pemerintah daerah, Riyanti akhirnya dibawa berobat ke Jakarta.” kata Trisnawati, anggota Balai Perempuan Mahkota. “Tapi sayang, sudah sangat terlambat dan tidak dapat lagi diselamatkan,” lanjut Trisnawati lirih. Kondisi anak ini, hari demi hari terus menurun. Dia tidak mau menjalani kemoterapi karena melihat teman di sampingnya menjadi botak, akibat kemoterapi. R akhirnya meninggal dunia, pada akhir November 2016. (GS2016)

SEKILAS TENTANG BP MAHKOTA



Mulyana, Sekretaris BP Mahkota

Balai Perempuan Mahkota memiliki pertemuan rutin yang dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Kegiatan yang biasa dilakukan mulai dari penguatan organisasi, hingga membahas perencanaan kegiatan. Balai Perempuan Mahkota sudah memiliki Dewan Kelompok Kepentingan Profesional, Ibu Rumah Tangga, Informal, dan Petani. Anggota yang aktif saat ini berjumlah 40 perempuan. Anggota BP Mahkota tergolong sulit secara ekonomi. *“Karenanya, untuk menarik iuran uang sangat sulit dilakukan. Mungkin bulan depan kami akan iuran beras, setengah cangking per orang, iuran beras ini untuk bayar pelatihan, membantu anggota yang tidak mampu, dan kebutuhan transportasi ketika mengikuti pelatihan,”* jelas Mulyana Sekretaris Balai Perempuan Mahkota.

Selain melayani kepentingan masyarakat sekitar, Balai Perempuan Mahkota juga serius memperjuangkan kepentingan anggotanya. Dari 40 anggota BP Mahkota, baru 22 orang yang memiliki KIS. *“Kami sudah membahasnya, agar semua anggota mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional,”* jelas Mulyana.

Mulyana juga prihatinkan dengan kebijakan perlindungan sosial yang silih berganti dengan cepat dan membingungkan masyarakat. Dalam pandangan Mulyana, Program JAMKESDA sangat baik dan memudahkan. Tapi pemerintah, berencana untuk menghentikan program tersebut. *“Kami merasakan dimudahkan. Pengalaman pribadi saya, pada awal 2014 menggunakan JAMKESDA ketika anak saya terkena demam berdarah. Untuk mengurus JAMKESDA, saya tidak dipersulit. Saya hanya membawa materai, mengisi identitas, nama anak, umur, dan pekerjaan, dan sebagainya,”* kenang Mulyana saat mengurus anaknya yang sakit.

“Tahun 2017 ini, JAMKESDA akan dihapuskan dan pemerintah melakukan launching Kartu Batanghari Sejahtera (KBS). Sewaktu pertemuan multi pihak, saya sempat bertanya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), apakah semua lini masyarakat akan mendapat KBS seperti JAMKESDA. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Ini bisa menjadi bumerang bagi kami, ketika kami terdaftar dengan KBS tapi tidak dapat JKN. Kalau membutuhkan layanan kesehatan sampai tingkat nasional, tidak bisa,” ungkap Mulyana.

Mulyana menceritakan, bahwa JAMKESDA di Desa Tenam tak memandang kaya dan miskin. Kalau mau mengurus JAMKESDA tetap dipersilahkan oleh kepala desa. Oleh karena itu, PIPA JKN Mahkota akan mencari kepastian, apakah KBS berlaku sama seperti JAMKESDA atau tidak. Mereka akan berkonsultasi dengan Dinas Sosial.

Menurut Mulyana, kehadiran PIPA JKN di Desa Tenam mendapatkan perhatian dari Datuk (istilah lain Kepala Desa). Hal ini terjadi karena saat awal akan membangun PIPA JKN, kami sosialisasi kepada Datuk. Dalam menangani masalah pengaduan warga, PIPA JKN juga berdiskusi dengan Datuk dan beliau dengan ringan membantu PIPA JKN, seperti membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Oleh karenanya, Datuk berencana mengalokasikan dana APBDes untuk PIPA JKN. (GS2016- diolah DKS 2017)

BP PIPA JKN Sejahtera, Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi



Sri Baenah | Sekretaris BP Sejahtera

Sri Baenah (40 tahun), Sekretaris Balai Perempuan Sejahtera, menuturkan bahwa dirinya sudah bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia sejak 2003. Sri Baenah menuturkan, *“perubahan yang saya rasakan tentunya dari bertambahnya ilmu karena Koalisi Perempuan punya pendidikan untuk anggota hingga pendidikan untuk pemilih cerdas. Salah satu alasan saya untuk berorganisasi adalah untuk bertukar pikiran dan bertemu teman-teman, saya merasa pengetahuan berkembang”*

Balai Perempuan Sejahtera memiliki kegiatan pertemuan rutin, setiap bulan pada hari Rabu minggu kedua. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas masalah yang dialami oleh masyarakat dan khususnya perempuan di Desa Tangkit. Pertemuan rutin juga membahas mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kesehatan reproduksi perempuan. Tak hanya itu, Balai Perempuan Sejahtera juga memiliki koperasi simpan pinjam, untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami anggotanya, yang kini berjumlah 34 perempuan. Balai Perempuan Sejahtera juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan ekonomi perempuan.

Banyak warga melapor, tidak memiliki Kartu Kesehatan, baik dalam bentuk KIS (Kartu Indonesia Sehat) maupun Kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Bahkan sebagian besar warga tidak memahami apa itu KIS atau JKN. Umumnya Warga datang ke PIPA JKN, manakala mereka sakit dan tidak dapat berobat. Ada juga yang datang meminta informasi bagaimana menggunakan kartu KIS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Selain itu, ada warga yang mampu menjadi peserta JKN mandiri, tapi tidak paham bagaimana cara mendaftarnya.

Melihat banyaknya warga yang datang mencari informasi tentang JKN, maka relawan PIPA JKN Balai Perempuan Sejahtera, menggunakan strategi “jemput bola” dengan cara mengumpulkan warga dan memberi penjelasan tentang Hak Warga Negara atas layanan kesehatan, dan program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Setelah melakukan sosialisasi, relawan PIPA JKN melakukan pendataan untuk ibu-ibu yang belum mempunyai kartu BPJS Kesehatan, ternyata banyak juga yang belum punya kartu KIS

Melihat banyaknya warga yang datang mencari informasi tentang JKN, maka relawan PIPA JKN Balai Perempuan Sejahtera, menggunakan strategi “jemput bola” dengan cara mengumpulkan warga dan memberi penjelasan tentang Hak Warga Negara atas layanan kesehatan, dan program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Relawan PIPA JKN, berusaha mengurus dokumen persyaratan agar perempuan tidak mampu dan keluarganya dapat memiliki Kartu JKN atau KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI). *“Kami berusaha mengurus SKTM dan mendaftarkan ke dinas sosial,”* jelas Sri Baenah. Selain itu, Relawan PIPA JKN Balai Perempuan Sejahtera, memandang bahwa kelompok lansia (lanjut usia) merupakan kelompok yang paling rentan sakit, tapi hampir semua lansia tidak punya Kartu JKN atau pun KIS. Oleh karenanya relawan PIPA JKN melakukan pendataan dan berencana melakukan advokasi hak layanan kesehatan bagi lansia, *“kami juga mendata lansia sedesa Tangkit, sekarang hanya tinggal rekapitulasinya. Ini bahan untuk dialog dengan Dinas Sosial,”* ujar Sri Baenah.

Relawan PIPA JKN menjelaskan bahwa di Desa Tangkit, belum ada Peraturan Desa atau kebijakan mengenai pemeriksaan kesehatan perempuan yang dilayani secara gratis. Namun untuk posyandu lansia ada yang gratis, bersamaan dengan posyandu anak. Relawan PIPA JKN berencana untuk mendorong adanya kebijakan tingkat desa. Relawan PIPA JKN juga merasa sedikit lega, bahwa JAMKESDA yang sempat terhenti tahun 2016, akan berjalan lagi di Muaro Jambi untuk tahun 2017.

Sri Baenah memandang bahwa keterwakilan perempuan di Desa Tangkit masih rendah. Perempuan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Melihat rendahnya partisipasi perempuan, Sri Baenah memberanikan diri untuk maju sebagai calon kepala desa. *“Saya pernah ikut berkompetisi menjadi calon kepala desa. Meskipun gagal dan tidak terpilih sebagai kepala desa, saya tidak berkecil hati. Karena ini pendidikan bagi perempuan. Bahwa perempuan bisa ikut berkompetisi di politik,”* jelas Baenah dengan semangat. *“Saya sedih, jika perempuan dianggap hanya pantas di rumah, tidak dapat mengambil keputusan, dan dianggap bodoh. Padahal kenyataannya, banyak sih perempuan yang punya kemampuan,”* lanjutnya.

Sri Baenah sebagai sekretaris balai perempuan dan seluruh anggota balai perempuan juga turut bangga dengan Balai Perempuan Sejahtera. Karena mereka merasa dihargai di desa dan kecamatan. *“Kapasitas kami bisa diperhitungkan oleh karenanya kami sering diundang dalam pembahasan berbagai masalah di desa. Ketika ada musim PEMILU, banyak calon legislatif maupun calon kepala daerah yang datang ke Balai Perempuan, untuk memperoleh dukungan. “Namun, kami bisa mengambil sikap untuk ikut memilih karena kami sudah mendapat pendidikan pemilih cerdas,”* jelas Sri Baenah.

BP PIPA JKN Bangun Karya, Desa Bangun Karya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Nunik | Anggota Kelompok Kepentingan Perempuan Lanjut Usia

Kehadiran PIPA JKN Balai Perempuan Bangun Karya sangat dirasakan masyarakat. Karena dengan adanya PIPA JKN, masyarakat dapat mengetahui program perlindungan sosial, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional dan dapat mengetahui tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) JKN. Selama ini masyarakat tidak memperoleh informasi sama sekali tentang JKN maupun BPJS, karena pihak BPJS maupun pemerintah tidak pernah sosialisasi di Desa Bangun Karya.

PIPA JKN Bangun Karya juga melakukan advokasi bagi perempuan maupun laki-laki yang miskin dan tidak punya Kartu JKN atau KIS. *“Kami usulkan ke dinas terkait agar warga miskin mendapat kartu BPJS,”* jelas Nunik.

Sebelum bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia, Nunik merasa kurang pengalaman. Tetapi setelah bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia, ia merasa ilmu, wawasan, dan kenalannya bertambah. Bergabung di kelompok kepentingan lansia membuatnya bersemangat untuk menggerakkan lansia. “Banyak ibu lansia yang ingin maju, menambah wawasan, menambah keterampilan, hingga meningkatkan ekonomi seperti dengan membuat makanan ringan dan anyaman kemudian dipasarkan,” ujar Nunik penuh semangat.

“Perubahan saya setelah ikut Koalisi Perempuan Indonesia adalah menjadi tambah semangat. Terutama dengan adanya PIPA JKN,” kata Nunik. “Malah ada yang bertanya apa pekerjaan saya sekarang, *kok* sekarang mondar mandir terus. Kemudian saya jelaskan bahwa saya bergabung dengan Koalisi Perempuan,” ungkap Nunik. Menurut Nunik, Balai Perempuan juga didukung oleh lingkungan sekitar, staff desa, hingga staff kecamatan. “Pengalaman yang saya paling ingat di Koalisi Perempuan Indonesia, ketika saya sering ketemu dinas-dinas, instansi-instansi, baik di kabupaten maupun provinsi. Kami jadi bisa mengutarakan apa yang kami rasakan dan laksanakan atau kerjakan.” Kenang Nunik mengakhiri percakapan dengan Redaksi

Lain halnya dengan Siti Sundari (45 tahun), Anggota Balai Perempuan Bangun Karya, Kelompok Kepentingan Lansia, ia menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia sejak Juli 2014. Siti Sundari aktif bertemu dengan pejabat BPJS, BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengatasi pengaduan masyarakat tentang Layanan Kesehatan. “Menurut saya layanan kesehatan sudah cukup baik. Tapi tidak semua warga kurang mampu memiliki kartu JKN. Karenanya saya juga akan memperjuangkan hak masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional,” tegas Siti Sundari. “Kami di balai perempuan membantu masyarakat yang belum memiliki kartu dengan melapor kepada desa kemudian meminta dibuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar masyarakat miskin dapat pelayanan kesehatan gratis,” tegas Nunik.



Siti Sundari | Kader BP Bangun Karya KK Lansia

PIPA JKN di Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Yogyakarta

Ada tiga balai perempuan yang menjadi Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi (PIPA) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- Cabang Sleman: Balai Perempuan Mawar & Balai Perempuan Dahlia
- Cabang Gunung Kidul: Balai Perempuan Pratama Mulya, Balai Perempuan Bhakti, Balai Perempuan Muda Pratama
- Balai Perempuan Jogoyudan, Kota Yogyakarta

Balai Perempuan Mawar & Balai Perempuan Dahlia, Cabang Sleman, DIY

Redaksi Semai meliput ke Balai Perempuan Dahlia dan Balai Perempuan Mawar, Cabang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Perempuan Dahlia dan Mawar beranggotakan perempuan buruh sehingga untuk melakukan pertemuan rutin cukup sulit karena para anggota bekerja dengan jadwal yang ditentukan pabrik.

Seringkali pertemuan rutin diadakan pada jam 11.00–19.00 WIB. Tempat pertemuan pun ikut berganti, “kami melakukan sistem bergilir ke rumah anggota atau di rumah saya. Iuran juga sudah berjalan Rp2.000/bulan digunakan untuk konsumsi dan kebutuhan sekretariat seperti fotokopi,” ujar Sriharyati, Sekretaris Balai Perempuan Mawar yang telah bergabung anggota Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2014.

“Kami membahas Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga anggota dan masyarakat sekitar yang belum punya kartu JKN kami minta mengumpulkan data,” cerita Sriharyati kepada SEMAI, “kemudian kami para pengurus Posko Pengaduan JKN akan mengurusnya sampai ke dinas sosial. Saat menyerahkan data ke dinas saya bertemu dengan Bapak Swarsono Ari, yang mengisi temu jejing di Kelurahan Margomulyo, Seyegan. Ketika data saya berikan, kata beliau akan diperiksa terlebih dahulu dan menunggu sekitar satu bulan, ketika kartu jadi nanti akan dihubungi,” lanjut Sriharyati menjelaskan proses kerja BP PIPA JKN.

Windarnigsih (39 tahun), anggota Balai Perempuan Mawar, bercerita tentang kekecewaannya terhadap pelayanan kesehatan menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Meski telah memiliki Kartu Indonesia Sehat tapi Windarnigsih tak dapat merasakan pelayanan kesehatan, “saya kecewa karena ketika anak saya patah tulang di rumah sakit tidak dapat ditangani. Pada awalnya saya membawa anak saya ke puskesmas di hari Senin, dari puskesmas diberi rujukan ke rumah sakit UGM, dari pagi hingga pukul 11.00 WIB saya mengantri dan tidak kunjung dilayani katanya syaratnya kurang. Saya disuruh ke polisi karena anak saya jatuh dari sepeda, katanya kalau tidak ada surat dari polisi maka tidak dapat ditangani,” cerita Windarnigsih

Akhirnya Windarnigsih membawa anaknya ke tukang pijat karena tak tega melihat kondisi sang anak yang sudah kesakitan. “Saya membayar Rp 50.000 untuk tukang pijat dan kartu yang pernah diberikan oleh ibu dukuh kepada saya tidak dapat digunakan,” tambahnya.



Windarnigsih | anggota Balai Perempuan Mawar

Hingga sekarang anggota Balai Perempuan Mawar ada 35 orang dan anggota yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ada 2 orang, sedangkan untuk pengaduan dari masyarakat yang belum punya ada 9 orang.

DIPANDANG SEBELAH MATA



Sriharyati | Sekretaris Balai Perempuan Mawar

“Masih ada anggapan perempuan ingin jadi pemimpin, ‘mana mungkin (perempuan memimpin) langkah perempuan kurang cepat’ begitu pandangan laki-laki,” ungkap Sriharyati yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa tetapi merasa dipandang sebelah mata

.....

Keseharian Sriharyati, Sekretaris Balai Perempuan Mawar adalah sebagai buruh pabrik, ketika selesai bekerja biasa dia membantu orangtua di sawah. Sriharyati merasa kondisi perempuan di desa memprihatinkan dan kurang mendapat kesempatan untuk maju di berbagai bidang, *“karena perempuan dianggap lemah, sehingga pembagian kerja untuk perempuan tidak boleh melebihi laki-laki,”* ujarnya. *“Untuk menjadi pemimpin, perempuan dipertanyakan kemampuannya, “padahal ada perempuan yang lebih kuat dibanding laki-laki,”* sambungnya.

Untuk mengubah pandangan tersebut dan mendorong kepemimpinan perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia berupaya memberdayakan serta meningkatkan kemandirian perempuan dengan kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi, salah satunya dengan membangun Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan melakukan sosialisasi pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional dan membantu masyarakat sekitar mendapatkan hak sebagai warga negara perempuan dapat menemukan kesempatan untuk diperhitungkan sebagai pemimpin. *“Masyarakat yang belum mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional bisa kami bantu, sehingga pandangan masyarakat bisa berubah, perempuan juga bisa menangani masalah-masalah. Pengalaman saya pribadi, keluarga mendukung saya bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia. Keberhasilan yang saya buat misalnya bisa menangani masalah Jaminan Kesehatan Nasional ini,”* cerita Sriharyati.

Sriharyati juga berbagi cerita mengenai kenangannya pada masa-masa awal bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia, *“saya serta teman-teman membentuk serikat buruh di perusahaan, kami juga pernah mengikuti pendidikan politik di Cebongan, disitu kami bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia pada 2014. Kami juga pernah ikut demonstrasi untuk mendukung perempuan menjadi anggota legislatif, saat itu saya bersama sekitar seribu orang perempuan turun ke jalan sekitar bundaran Malioboro.”*

Selain anggota Balai Perempuan Mawar, redaksi SEMAI juga sempat mewawancarai Sohiyem, Anggota Kelompok Kepentingan Buruh Balai Perempuan Dahlia. Pengalaman Sohiyem tak jauh berbeda, *“waktu bekerja yang tak tentu serta upah yang rendah menjadi masalah kami, pernah kami disuruh bekerja lembur tetapi kami menolak karena upah yang tak sesuai,”* jelas Sohiyem, *“kemudian pihak perusahaan mengajak kami bermusyawarah dan bersedia memberi upah lebih.”*

Dari 40 orang anggota Balai Perempuan Dahlia ada 4 orang anggota yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional dan menurut data Balai Perempuan Dahlia ada 26 orang masyarakat sekitar yang juga belum memiliki kartu JKN. Sohiyem mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah merasakan pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama atau puskesmas, *“puskesmas hanya buka di pagi hari sedangkan saya bekerja shift, jadi jika saya sakit biasanya saya ke bidan,”* ungkap Sohiyem.

PIPA JKN Cabang Gunung Kidul: Balai Perempuan Pratama Mulya, Balai Perempuan Bhakti, Balai Perempuan Muda Pratama



Paino (Kadiv Pelayanan Umum Desa Pengkol) dan Muryanto (Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pengkol)

Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi tak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

BEKERJA BERSAMA DENGAN PEMERINTAH

Koalisi Perempuan Indonesia percaya kerja-kerja yang dilakukan untuk kepentingan bersama harus melibatkan banyak orang agar perubahan tak hanya terjadi kepada anggota Koalisi Perempuan Indonesia, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat sekitar.

Redaksi SEMAI bertemu dengan Paino, Kadiv Pelayanan Umum Desa Pengkol. Paino, begitu ia biasa disapa, mengatakan bahwa dirinya mengetahui adanya Koalisi Perempuan Indonesia di Gunungkidul karena adanya acara pemberdayaan perempuan, *“Saya membantu Koalisi Perempuan Indonesia jika mengadakan acara di kantor Desa Pengkol misalnya membantu membuat dan mengirim undangan, dan jika ibu-ibu pengurus posko tidak ada, saya ikut menjaga posko bila ada pengaduan.”*

Tak hanya Paino, Semai juga dapat bertemu dengan Muryanto, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Muryanto, begitu sehari-hari biasa dipanggil, mengetahui Koalisi Perempuan Indonesia sejak 2009 karena diundang untuk berdiskusi di beberapa pertemuan Koalisi Perempuan Indonesia yang dilakukan di Kantor Desa Pengkol.

Pemerintahan Desa Pengkol terlibat dalam mendata aduan warga yang belum terdaftar pada Jaminan Kesehatan Nasional ataupun Daerah, *“sesuai dengan prosedur layanan di statistik kemudian data warga yang terlewat di desa sudah didata kembali oleh bagian kesejahteraan rakyat dan diusulkan kembali. Kami membantu ibu-ibu Koalisi Perempuan Indonesia untuk mengumpulkan pengaduan dari warga yang tak terdata itu,”* ujar Muryanto.

Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul telah memiliki anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah. Namun dana ini terbatas sehingga Muryanto mengakui bahwa Jaminan Kesehatan dengan cakupan nasional tentunya lebih baik untuk melindungi masyarakat.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih membutuhkan perbaikan, permasalahan mengenai data masyarakat yang berhak dan harus mendapatkan bantuan memang berada di pendataan statistik dan harus terintegrasi dengan data yang berada di desa. *“Karena turunnya berdasarkan nama, sehingga ketika di desa baru disesuaikan, kemarin juga disaring dengan adanya posko pengaduan PIPA JKN,”* jelas Muryanto.

Beragam bantuan pelayanan kesehatan di Desa Pengkol sudah berjalan seperti pemeriksaan darah gratis (hemoglobin) dan pengobatan atau operasi katarak gratis. Menurut Muryanto ada sekitar 10% warga yang belum mendapat kartu Jaminan Kesehatan (baik daerah atau nasional). “Kami aparat desa kesulitan juga dalam mendata karena warga hanya diam, kalau sakit dan mau berobat terkadang baru ketahuan. Koalisi Perempuan di sini membantu aparat desa untuk menjemput bola, kalau yang belum memiliki kartu kami bisa bantu buat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) jadi bisa dibantu mengurus ke dinas sosial,” ujarnya.

LAYANAN KESEHATAN GUNUNG KIDUL



Kristiana Suyatmagung, Kepala Bidang Sosial
Disnakortrans Gunungkidul

“Program kesehatan juga didukung dengan adanya kader-kader pelayanan terpadu sampai pelosok desa bahkan rukun tetangga. Kemudian pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun saya rasa makin meningkat,” ujar Kristiana Suyatmagung, Kepala Bidang Sosial Disnakortrans Gunungkidul.

Redaksi SEMAI berkesempatan mewawancarai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunung Kidul. Untuk Kabupaten Gunung Kidul beragam pelayanan kesehatan sudah menjadi program kerja pemerintah misalnya pelayanan kesehatan untuk lanjut usia dan pelayanan terpadu untuk anak.

Integrasi Jaminan Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul pada 2017 telah dipersiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Kristina alokasi APBD untuk mengimbangi pendanaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari pusat sudah cukup besar, sedangkan kurang lebih 20% masyarakat sudah terlayani dari dana APBD.

“Akan ditingkatkan lagi pada 2017 sehingga bisa lebih dari 20% masyarakat terlayani sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat. Untuk 2016 dengan KIS dari dana APBD sudah ada 10 milyar, untuk 2017 akan naik menjadi 12 hingga 14 milyar,” kata Kristina.

Kristina juga menjelaskan mengenai pendaftaran Penerima Bantuan Iuran dari dana APBD, *“pendaftaran cukup menggunakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Setelahnya akan dicek oleh tim penanggulangan kemiskinan di desa dan di kecamatan, setelah ditanda tangani kecamatan akan diteruskan ke dinas sosial. Proses ini direncanakan 3 bulan, kartu kemudian akan diverifikasi agar tak ada data yang double dan setelahnya akan dicetak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).”*

KESEHATAN ADALAH SEGALANYA

Yulianti Ningsih, Anggota Kelompok Kepentingan Informal. Kader Posyandu

Harapan hidup suatu negara merupakan salah satu faktor pengukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia menentukan suatu negara masuk dalam kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang



Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia berasal dari beragam profesi dari tingkat desa atau biasa disebut Balai Perempuan.

Yulianti Ningsih, Anggota Kelompok Kepentingan Informal Balai Perempuan Pragma Mulya merupakan kader Posyandu. *“Posyandu Padukuhan Gagan melakukan penimbangan balita dan lansia, serta memberikan makanan tambahan. Sedangkan untuk Balai Perempuan kami menerima laporan bahwa ada seorang ibu yang menderita tumor dan tak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional,”* ucap Yulianti yang juga bekerja sebagai pendidik di PAUD.

“Setelah diperiksa, dokter menganjurkan untuk segera melakukan operasi, karena ibu tersebut belum memiliki kartu sehingga harus menunggu selama 2 minggu untuk membuat kartu dengan biaya pribadi, padahal dia dan suami hanya seorang petani, semua anaknya merantau dan mereka tak punya penghasilan pasti,” jelas Yulianti.

Dari kasus ibu dengan penyakit tumor tersebut, bisa dibayangkan bahwa kesehatan adalah segalanya, demi menjalani perawatan kesehatan yang terjangkau masyarakat miskin rela menjadi peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional. *“Saya sendiri sebagai kader kesehatan juga belum memiliki kartu, sekarang masih dalam proses mendaftarkan diri ke dinas sosial,”* ungkap Yulianti.



Sumiyati, Anggota Koalisi Perempuan Indonesia, Kelompok Kepentingan Petani

Bagi Sumiyati (30 tahun) Anggota Koalisi Perempuan Indonesia, Kelompok Kepentingan Petani, kesehatan adalah segalanya. Dengan kondisi yang sehat dia dapat bercocok tanam di sawah dan dapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Kondisi cuaca serta hama yang menyerang juga menjadi kekhawatiran Sumiyati sebagai petani. Dengan adanya Kartu Indonesia Sehat, Sumiyati menjadi lebih tenang karena jika suatu hari dirinya sakit dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang tak terduga, *“pengalaman saya menggunakan kartu KIS cukup baik dan memuaskan.”*



CERITA PENGURUS PUSAT INFORMASI, PENGADUAN, DAN ADVOKASI JKN

Barini, Anggota Kelompok Kepentingan Ibu Rumah Tangga Balai Perempuan Pratama Mulya

Barini bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Gunungkidul sejak 2013 dan telah mengikuti Pendidikan Kader Dasar. Barini menjelaskan bahwa dirinya tergabung dalam Balai Perempuan Pratama Mulya, *“pratama itu artinya pertama dan harapannya mulya itu, diharapkan mencapai kemulyaan,”* jelasnya.

Balai Perempuan Pratama Mulya beranggotakan 40 orang, dari jumlah anggota tersebut ada 7 orang yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan. *“Usaha yang kami lakukan adalah melalui pendataan, sosialisasi di RT/RW, kemudian mencari surat pengantar dari RT/RW/dukuh kemudian kami minta kelengkapan data seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, bukti rekening listrik, atau akte kelahiran (bagi anak), serta bukti fotokopi BPJS bagi keluarga yang anggota keluarganya belum mendapat bantuan iuran,”* sambung Barini.

Balai Perempuan Pratama Mulya telah mendapatkan 10 pengaduan terkait pendataan kartu jaminan kesehatan yang belum didapat oleh masyarakat sekitar, *“masyarakat tahu mengenai posko pengaduan Jaminan Kesehatan Nasional karena ibu-ibu anggota balai melakukan sosialisasi. Kami sebagai pengurus posko ada 4 orang,”* ujar Barini

Bagi Barini pelayanan kesehatan yang dia rasakan sudah memuaskan. Dia bercerita bahwa dirinya tak mengeluarkan biaya pengobatan ketika anaknya harus dirawat karena penyakit tifus. *“Keluhan saya untuk alat-alat kesehatan di Nglipar yang kurang lengkap, sehingga harus berobat lebih jauh ke Wonosari, terlebih lagi jika harus menyewa mobil dengan biaya Rp150.000 – Rp200.000,”* keluh Barini.

MENDUKUNG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI DESA

Fitri sudah bergabung selama dua tahun di Koalisi Perempuan Indonesia dan pengalaman yang paling berkesan baginya adalah saat berdemo untuk mendukung kepemimpinan perempuan di desa. *“Saya ikut juga dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan usulan saya dapat diterima misalnya kalau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) perempuan bisa dilibatkan. Biasa kalau rapat di desa perempuan kurang ditanya, jadi yang saya lakukan adalah duduk di depan dan mengusulkan ide agar perempuan dapat keterampilan agar dapat membantu suami meningkatkan perekonomian, jangan hanya bergantung pada hasil di kebun misalnya belajar mengayam, membuat keripik dan mengembangkan industri rumah tangga lainnya.”*



Fitri, Sekretaris Balai Perempuan Bakti

Untuk mendorong kepemimpinan perempuan, peran serta laki-laki sangat dibutuhkan, begitulah kesan dari Fitri dan sang suami. Fitri bercerita bahwa suaminya membantu untuk kegiatan pendataan kesehatan. Tak hanya sang suami, peran serta aparat desa juga diperlukan, “RT/RW juga mendukung dan antusias dengan yang saya dan balai perempuan lakukan”.

Fitri bercerita mengenai pengalamannya mengurus Jaminan Kesehatan Nasional, “saat ini kami sudah mengumpulkan data serta mengeluarkan surat edaran dari Koalisi Perempuan Indonesia agar bisa mengurus data itu secara kolektif. Saya mendengar dari tetangga saya yang harus dirawat hingga menginap di rumah sakit, dia harus meninggalkan KTP karena ada biaya administrasi tambahan, pihak rumah sakit berkata bahwa telah membicarakan biaya administrasi ini pada pihak keluarga tetapi keluarga tak ada yang merasa pernah mendengar biaya tambahan ini, meski hanya Rp300.000 seharusnya semua biaya dijelaskan dan dapat persetujuan dari keluarga,” tutur Fitri merasa kecewa dengan komunikasi yang tak jelas dari pihak rumah sakit.

USIA BUKAN PENGHALANG AKTIF BERORGANISASI

Rubinem (70 tahun) kader Koalisi Perempuan Indonesia menuturkan bahwa pengalamannya sebelum mengikuti Koalisi Perempuan Indonesia adalah mengikuti kegiatan pertahanan sipil. “Dulu saya aktif berolahraga kasti, pembinaanya dulu mantan lurah dan saya sempat menjadi juara dua kali, di balai desa saya menjadi komandan pleton Babinsa Desa Pengkol,” jelas Rubinem. Babinsa melaksanakan fungsi pembinaan dan bertugas pokok melatih rakyat dalam penyuluhan bidang pertahanan dan keamanan serta pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di pedesaan. “Saya ingat dulu kami semua perempuan 21 orang, selama aktif ikut olahraga kasti itu suka dukanya kalau ada teman satu tim yang punya anak kecil juga tetap latihan giat demi mendapatkan gelar juara. Ketika kami ikut lomba yang ada hanya dana makan dan transportasi, ketika menang juga hanya mendapat piala yang disimpan di kantor desa,” kenangnya.

Rubinem bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia sudah dua tahun. Rubinem mempunyai penyakit asam urat sehingga bila ke puskesmas biasanya membayar Rp8.500 dan bila ke mantri Rp35.000, “saya sudah pernah terapi, pengobatan dari India membayar hingga Rp1.700.000. Pengobatannya dengan cara terapi, kaki disetrum setelah terapi itu saya sembuh dan bisa menekuk kaki lagi,” kata Rubinem. Rubinem kehilangan Kartu JAMKESDA dan sudah melaporkan ke pak dukuh, tapi selama satu tahun tak pernah diproses. “Ketika temu jejaring saya protes, kenapa yang mendapat bantuan langsung tunai sudah mendapat sampai 13 kali dan punya kartu lebih dari satu ada Jamkesta, Jamkesda, BPJS kok saya sama sekali tidak dipikirkan, begitu protes saya.” Akhirnya pada September 2016 Rubinem menerima Kartu Indonesia Sehat dari bapak dukuh.



Rubinem (70 tahun), Anggota Kelompok Kepentingan Petani

Rubinem kehilangan Kartu JAMKESDA dan sudah melaporkan ke pak dukuh, tapi selama satu tahun tak pernah diproses.



MENGAWAL PEMILU & KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Karsiem, Anggota Kelompok Kepentingan Ibu Rumah Tangga

Karsiem, mengisahkan pengalamannya bersama Koalisi Perempuan Indonesia. Karsiem sudah mengikuti Pendidikan Kader Dasar dari Koalisi Perempuan Indonesia. Pengalamannya bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia adalah mengikuti orasi. *“Pertama-tama mengumpulkan anggota dan membagi tugas seperti membuat lagu dan makanan bersama, malam sebelumnya saya ditugaskan untuk melakukan orasi. Kemudian pagi harinya kami berkumpul dan dijemput oleh 3 buah bus,”* jelasnya.

“Saya ingat kami diturunkan di Jalan Abu Bakar sebelum ke Malioboro, banyak orang bertanya apa itu Koalisi Perempuan Indonesia dan saya jelaskan sebisa saya. Ketika berorasi saya menyampaikan bahwa perempuan juga bisa maju ke legislatif perasaan saya bangga bisa ikut ke sana serta mengungkapkan pendapat tentang hak perempuan.”

Selain itu, Karsiem juga pernah menjadi pengawas Pemilu, waktu itu Karsiem bertugas di TPS 8. *“Dari satu dusun terpilih 2 orang karena kami tak ada yang bisa mengendarai motor maka kami jalan kaki sekitar satu setengah jam. Sampai di tempat Pemilu kami menunjukkan surat dari Koalisi Perempuan Indonesia dan disambut baik. Tugas saya waktu itu adalah mencatat yang hadir dan tidak hadir kemudian dibawa ke desa untuk dicocokkan datanya sama atau tidak. Tadinya saya ditugaskan untuk menjadi saksi saja takut, tapi kali itu saya berhasil jadi pemantau Pemilu,”* tuturnya menjelaskan tugasnya.

Menurut Karsiem perempuan belum berani menjadi kepala desa karena terhalang persyaratan pendidikan minimum, *“saya sendiri hanya lulus SMP sehingga tidak mungkin jadi kepala desa, terhambat karena persyaratan. Maka, anak-anak saya suruh belajar lebih rajin dan lebih tinggi jenjang pendidikannya agar bisa menjadi pemimpin suatu hari nanti.”*

PUSAT INFORMASI, PENGADUAN, DAN ADVOKASI (PIPA) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Balai Perempuan Jogoyudan, Kota Yogyakarta

KELURAHAN GOWONGAN TERBANTU PIPA



Karsiah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan

Sebagai organisasi massa dengan prinsip demokrasi, penting bagi Koalisi Perempuan Indonesia menjalin komunikasi serta kerjasama dengan pemangku kebijakan agar kebijakan yang dibuat tidak meninggalkan hak perempuan dan kaum tertindas. Untuk mengetahui kerjasama yang telah dibangun oleh pengurus Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan pemerintah kota Yogyakarta maka redaksi SEMAI datang ke Kantor Kepala Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. **Karsiah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat** Kelurahan Gowongan mengatakan bahwa secara pribadi dia mengenal Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2015 dan telah mengetahui ada posko pengaduan Jaminan Kesehatan Nasional di Jogoyudan.

“Kami juga bekerjasama untuk melakukan advokasi anggaran dan diajukan ke walikota, sudah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan hadirnya Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional membantu kami, sehingga kelurahan terbantu dalam mendata, Balai Perempuan sebagai PIPA bisa menjadi partner,” tutup Pak Karsiah.

Baginya jaminan kesehatan bagi masyarakat sangatlah penting, setiap orang harus memiliki jaminan kesehatan, yang mampu maupun tidak mampu. Yang tidak mampu, dibantu oleh pemerintah. “Saya berkomunikasi dengan Mbak Lis (anggota Koalisi Perempuan Indonesia), kami bekerjasama dengan petugas kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), untuk mendata warga tidak mampu yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan.”

BALAI PEREMPUAN JOGOYUDAN : PEREMPUAN HARUS BERDAYA



Lastih, Sekretaris Balai Perempuan Jogoyudan

Koalisi Perempuan Indonesia mendorong anggota untuk selalu meningkatkan kapasitas melalui pendidikan kader berjenjang. “Sebelum mengikuti Koalisi Perempuan Indonesia saya hanya ibu rumah tangga biasa. Sekarang setelah aktif di Koalisi Perempuan Indonesia saya berani ke kelurahan dan kecamatan padahal dulu saya penakut,” ujar Lastih, Sekretaris Balai Perempuan Jogoyudan. Lastih bercerita bahwa suaminya mendukung kegiatannya di Koalisi Perempuan Indonesia, tetapi ada tetangga yang mencurigai kegiatan-kegiatan Lastih dan beranggapan Lastih telah mengikuti kelompok militan ekstremis. Sampai suatu hari ketika Lastih hendak mengikuti pelatihan di Surabaya, suaminya mulai bertanya secara rinci tentang apa yang dirinya lakukan di Surabaya dan pihak mana yang membiayainya. “Untungnya, saya bisa menjelaskan bahwa saya ke Surabaya karena disuruh belajar dan diajari untuk berani menghadapi masalah begitu,” ujar Lastih yang telah bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia sejak 2015.

Sebagai Sekretaris Balai Perempuan, Lastih menjelaskan bahwa ada 3 dari 28 orang anggota yang belum memiliki kartu BPJS. Tak hanya mencatat aduan dari anggota, pengurus Balai Perempuan juga mengumpulkan 10 laporan terkait Jaminan Kesehatan Nasional dari masyarakat sekitar. “Kini semua laporan tersebut sudah kami sampaikan ke dinas sosial dan akan segera disurvei oleh dinas sosial,” kata Lastih.

Balai Perempuan Jogoyudan merupakan salah satu balai perempuan yang sudah menanamkan sikap kemandirian dalam berorganisasi, Balai Perempuan Jogoyudan sudah menerapkan iuran secara rutin. Lastih selaku sekretaris balai menjelaskan bahwa besarnya iuran tidak selalu sama, kini terjadi perubahan. Pada awalnya diberlakukan iuran sejumlah Rp10.000, untuk koperasi Rp5.000, untuk simpanan wajib Rp1.500, untuk konsumsi Rp2.500, untuk sosial Rp1.000. *“Sekarang iuran per orang menjadi Rp 7.000 dengan rincian Rp2.000 untuk tabungan, Rp1.500 untuk simpanan wajib, Rp1.000 untuk sosial, Rp2.500 untuk snack,”* jelas Lastih.

Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional tak hanya membahas JKN namun juga memberikan edukasi kepada anggota mengenai Hak Asasi Manusia termasuk pemahaman mengenai bantuan sosial hingga kekerasan dalam rumah tangga. *“Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga kami berdiskusi bersama untuk menyelesaikannya, sejauh ini masalah kekerasan dalam rumah tangga masih bisa ditangani dan tidak sampai bercerai. Selain itu kami juga memperhatikan masalah pembagian beras miskin dan melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan,”* kata Lastih.

Selain bertemu dengan Sekretaris Balai Perempuan Jogoyudan, redaksi Semai juga bertemu dengan beberapa anggota salah satunya Rini dari Kelompok Kepentingan Miskin Kota. Rini sudah bergabung sejak 2015 dan telah mengikuti Pendidikan Kader Dasar, *“saya pernah ikut diskusi mengenai disabilitas sehingga saya tahu kebutuhan penyandang disabilitas dan bagaimana mendapat alat bantu untuk mereka misalnya kursi roda dan alat bantu dengar,”* ujarnya.

Bagi Rini, menjadi anggota mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cukup membantu dia dan keluarganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, *“kebetulan saya sudah menjadi anggota BPJS mandiri, saya ambil kelas 3. Saya pikir yang penting ketika keluarga sakit bisa tertangani, sebulan sekali harus membayar Rp25.500/orang, sayangnya harus daftar sekeluarga jadi yang mendaftar 4 orang.”*

Suatu ketika suami Rini harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas dan Rini mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan cukup baik meski tak sepenuhnya gratis, *“setelah suami saya diperiksa, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa harus membayar kurang lebih Rp60.000, awalnya saya kira itu uang obat saja ternyata untuk dokter yang mengecek suami saya.”*

Kondisi suami Rini sudah tergolong berumur (tua), sehingga untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit. Dengan keadaan tersebut, maka kini Rini menjadi tulang punggung keluarga, dia bekerja sebagai pengemudi ojek online, ojek khusus perempuan muslimah. Rini bercerita dari pekerjaannya sekarang dia dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta mendapat pengalaman baru setiap harinya, *“yang unik*



Rini | Anggota BP Jogoyudan Kelompok Kepentingan Miskin Kota

dari menjadi pengemudi ojek misalnya penumpangnya ibu-ibu kalau belanja yah saya bantu membawa belanjanya, kadang kalau bawa anak saya jaga anaknya begitu.” Rini merasa beruntung dapat memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa harus meminta bantuan dari pihak manapun, baginya kesehatan keluarga dan pendidikan anak-anaknya adalah yang terpenting.

Balai Perempuan Jogoyudan juga memiliki anggota dari Kelompok Kepentingan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa. Herwari Primas Dini lulus dari SMK tiga tahun yang lalu, *“sekarang saya menunggu kesempatan untuk ikut seleksi penerimaan mahasiswa di universitas negeri. Saya sempat bekerja di laboratorium kimia. Harapan saya sebagai anak muda di lingkungan miskin kota semoga ada keringanan biaya untuk melanjutkan pendidikan,”* harapnya.

Herwari Primas Dini atau biasa dipanggil Imas menyatakan bahwa Balai Perempuan Jogoyudan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional mendata dari rumah ke rumah, *“cukup banyak yang sudah punya kartu Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk yang tidak punya kami kumpulkan KTP, Kartu Keluarga atau akte kelahiran kemudian kami fotokopi untuk diserahkan ke dinas sosial.”*



Mursiti dan Herwari Primas Dini

Imas yang terbilang anggota baru di Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Yogyakarta mendapatkan semangat serta dorongan dari sang ibu, Mursiti yang telah bergabung sejak 2013 lalu. Pengalaman Imas dalam mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama kurang memuaskan, *“kalau saya sakit dokternya kurang detail dalam memeriksa dan jika diberikan obat sudah dapat ditebak obatnya sama dan terasa kurang manjur, berbeda dengan berobat dengan membayar langsung,”* keluh Imas.

Imas juga mengungkapkan bahwa tak mudah untuk bekerja sama dengan pemerintah seperti RT/RW. *“Kebanyakan dari RT tidak merespon dengan baik, di kecamatan ada petugas TKSK, ketika kami mengusulkan nama-nama untuk dibuatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional tanggapannya kurang baik karena kami bukan dari pemerintahan. Jadi data hanya diterima dan diinformasikan akan disurvei. Katanya harus masuk ke IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) itu nanti baru akan direspon,”* jelasnya mengungkapkan hambatan dalam melakukan advokasi untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Pada akhirnya pengurus Balai Perempuan Jogoyudan bertemu dengan dinas sosial dan mendapat informasi bahwa akan ada survey bulan November hingga Desember 2016 terkait jaminan kesehatan

Perasaan tidak puas dengan pelayanan kesehatan tak hanya dirasakan sang anak, kini Mursiti juga angkat bicara, *“saya punya kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang dibayar secara mandiri, pelayanan yang saya rasakan kurang memuaskan karena adanya sistem rujukan. Pada awalnya saya di RS Panti Rapih sekarang menjadi RS Ludira Husada, karena pindah rumah sakit ini jadi rekam medis saya hilang harus dari awal lagi.”*

Mursiti yang telah mengikuti Pendidikan Kader Menengah di Surabaya, kini dipercaya sebagai Sekretaris Cabang Kota Yogyakarta, *“sebagai pengurus BP PIPA JKN kami dilatih mengenai kasus misalnya ada ibu yang sangat miskin, tidak punya kartu Jaminan Kesehatan Nasional, dan tidak dilayani dengan baik maka cara membantunya dengan membantu mendaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional,”* jelas Mursiti.

Mursiti pun bercerita mengenai duka yang sempat dia rasakan karena tinggal di pinggir Kali Code, *“ketika tahun 2010 kami yang bermukim di dekat kali terkena musibah lahar dingin karena erupsi Gunung Merapi, kami bingung harus melakukan apa, rumah terendam, masih punya anak kecil, dan tak punya posko hingga akhirnya kami ditampung di lapangan dan mendapat bantuan berupa selimut dan makanan.”*

PIPA JKN di Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah

Ada tiga balai perempuan yang menjadi Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi (PIPA) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Tengah, yaitu :

- BP PIPA JKN Batusuya Go'o, Kecamatan Sindul Tombusabora, Kabupaten Donggala
- BP PIPA JKN Petobo, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan
- BP PIPA JKN Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi

BALAI PEREMPUAN BATUSUYA GO'O, DESA BATUSUYA GO'O, KECAMATAN SINDUL TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA



Samsiar, Sekretaris Cabang

Samsiar (45) menuturkan bahwa ia pertama bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia pada tahun 1998. *"Ketika tahun 2009, saya mengikuti Kongres Nasional di Jakarta. Sebelumnya, saya menjadi Sekretaris Balai dan Dewan Kelompok Kepentingan Profesional,"* jelasnya. *"Kemudian pada 2004 ada pemilihan sekretaris cabang, saya terpilih. Setelah itu, kami mengaktifkan kembali Balai Perempuan Batusuya Goo sehingga terbentuklah Balai Perempuan Batusuya Go'o sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA JKN),"* tuturnya lagi.

Anggota Balai Perempuan yang sudah mendapat kartu tanda anggota sudah mencapai 50 orang. *"Pada mulanya, ibu-ibu di sini masih awam mengenai hak-hak perempuan, sedikit demi sedikit dengan adanya Koalisi Perempuan Indonesia mereka menjadi tahu, masyarakat semua ingin menjadi anggota. Jadi kalau ada pertemuan semua mau ikut, akhirnya dibuat bergilir agar semua belajar,"* cerita Samsiar

Secara pribadi, Samsiar menyatakan terjadi perubahan pada dirinya, *"saya berterima kasih, kami jadi tahu hak-hak perempuan,"* kata Samsiar. *"Saya juga telah mengikuti Pendidikan Kader Dasar, Pendidikan Kader Lanjut, Pelatihan Advokasi, hingga Pendidikan Pemilih Cerdas,"* tambahnya lagi. Samsiar juga menceritakan bahwa ada perubahan yang nampak di masyarakat, misalnya perempuan tahu mengenai hak kesehatan. Tak hanya itu, perubahan sikap pun terjadi. Dulu itu ibu-ibu kalau ada undangan acara duduk di belakang, tetapi dengan adanya Koalisi Perempuan Indonesia mereka mau duduk di depan dan ingin mengeluarkan pendapat. Dengan aktifnya perempuan di desa, maka kepala desa pun merespon positif dengan adanya Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional.



HARRY Y. LALUNI, Pengurus
Desa Batusuya Go'o

PASIHEN BPJS DINOMORDUAKAN OLEH RUMAH SAKIT

Harry (52) menceritakan Pengalaman mengakses pelayanan kesehatan dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang pernah dirasakan adalah ketika masyarakat Desa Batusuya Go'o mendapat rujukan ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, Harry ditanya terlebih dahulu apakah pasien BPJS atau membayar tunai. Saat dia menjawab bahwa dia menggunakan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit kemudian mengecek dan mengatakan ruangan untuk kelas tiga penuh semua. Mereka menyarankan agar pasien ke rumah sakit lain.

Ketika sampai di rumah sakit, Harry ditanya terlebih dahulu apakah pasien BPJS atau membayar tunai. Saat dia menjawab bahwa dia menggunakan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit kemudian mengecek dan mengatakan ruangan untuk kelas tiga penuh semua. Mereka menyarankan agar pasien ke rumah sakit lain.

“Akhirnya, adik saya turun tangan dan memeriksa ruang ternyata ada ruangan. Kebohongan dari pihak rumah sakit ini membuat kami sadar, bahwa ada perbedaan pelayanan, antara pengguna BPJS dan bukan BPJS. Pihak rumah sakit sampai memanggil petugas keamanan karena kami bersikeras agar rumah sakit membuktikan bahwa ruangan penuh, ternyata yang kami lihat ada ruangan kosong,” ujar Harry.

“Seharusnya pihak rumah sakit tidak berbohong dan melayani dengan benar. Pada saat masuk rumah sakit semestinya ada petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang bantu memediasi atau menolong agar pasien diterima dahulu, serta harus ada kendali dan transparansi mengenai ruangan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan terlantar. Harus ada pihak rumah sakit yang juga membantu mencari rumah sakit lain, masyarakat kadang hanya datang dengan kartu, sulit untuk mendapatkan transportasi dan untuk jaminan sulit, karena untuk makan saja tidak punya uang. Maka dari itu saya bersyukur dengan adanya Koalisi Perempuan Indonesia kami berharap mendapat pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi,” sambung Harry.

Harry juga punya pengalaman pribadi saat mengakses pelayanan kesehatan menggunakan kartu BPJS mandiri ketika dirinya sakit gigi. Dia datang ke salah satu rumah sakit di Palu, “pertama-tama yang ditanyakan adalah kenapa saya tidak ke puskesmas, saya kemudian menjelaskan tidak ada dokter gigi di sini, saya disuruh kembali untuk minta rujukan. Akhirnya pihak rumah sakit menelepon puskesmas dan tahu bahwa tidak ada dokter di puskesmas.”

Akhirnya Harry menjalani proses berobat di poli gigi dan giginya mau ditambal. “Dokter memberi informasi bahwa bahan untuk menambal gigi menggunakan BPJS dan tunai berbeda standarnya. Kemudian saya berpikir, apakah gigi saya hanya sebagai percobaan, kalau hanya satu sampai dua bulan kambuh lagi, harus tambal ulang untuk apa. Saya berobat agar gigi tidak sakit lagi.” Tutup Harry kecewa dan bertanya-tanya.

MENDUKUNG BALAI PEREMPUAN

Indra Jaya Yoce, Kepala Desa Batusuya Go'o, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, menyatakan, “saya mendukung adanya Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saya sudah pernah diajak berdiskusi dengan ibu-ibu di Balai Perempuan dan juga dengan pengurus program MAMPU,” kata Indra.

Pelayanan kesehatan menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), sebenarnya membuat Indra kecewa. “Pengalaman ini saya rasakan tahun 2015, ketika istri saya hamil. Saya sudah berkoordinasi



Indra Jaya Yoce, Kepala Desa Batusuya Go'o

dengan dokter kandungan, saya diarahkan ke rumah sakit pada malam istri saya sakit perut,” kenang Indra. “Perjalanan ke Palu kurang lebih dua jam, kami sampai di rumah sakit pukul 06.00 WITA di Rumah Sakit Tentara. Sampai jam 14.00 WITA istri saya kesakitan dan tidak ditangani dengan baik, sehingga akhirnya anak saya meninggal. Saya kecewa dan sakit hati saat itu,” kenangnya kehilangan sang buah hati. “Program BPJS ini, menurut saya kurang berhasil untuk skala daerah karena pihak terkait tidak diberikan pengarahan atau pengetahuan tentang BPJS sehingga terjadi carut-marut di sana sini,” tegasnya menilai pelaksanaan BPJS di daerahnya.

“Ketika sampai di rumah sakit, saya ditanya dulu, mau menggunakan Kartu BPJS atau membayar tunai. Kemudian saya bertanya apa perbedaannya, menurut dokter yang membayar tunai agak bagus, kalau BPJS kurang. Tetapi tetap saja, saya kecewa bayi saya meninggal. Pada akhirnya saya dipertemukan dengan kepala rumah sakit yang kemudian menjelaskan kepada saya bahwa dokter bedah yang bertugas di rumah sakit mereka masih menangani pasien di rumah sakit lain,” tuturnya lagi.

“Sesudahnya saya tidak mau lagi membayar iuran BPJS. Saya rasa program ini perlu dikaji ulang karena pihak BPJS tidak ada di rumah sakit, mereka tutup mata, seharusnya ada petugas BPJS di ruang UGD setiap rumah sakit di Indonesia, supaya apa yang terjadi pada saya tidak terulang lagi,” tukasnya. Indra pun menyatakan, “sebagai manusia saya merasa lebih dihargai ketika membayar tunai, dibanding saat menggunakan kartu, pelayanannya berbeda bagaikan langit dan bumi.”

“Setelah saya dilantik sebagai kepala desa, tiga bulan pertama 2016 ada Dinas Sosial yang datang dan membawa Kartu Indonesia Sehat. Ketika itu, data yang masuk tidak sesuai. Banyak masyarakat yang mampu mendapat kartu, tapi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, justru tidak mendapatkan kartu,” kenangnya.

Indra yang menjabat sebagai Kepala Desa Batusuya Go'o kemudian memohon kepada petugas dinas untuk diadakan pendataan kembali dengan didampingi oleh kepala dusun masing-masing. Kekecewaan Indra pun bertambah ketika petugas dinas berkata bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena data tersebut dari pusat yang dikumpulkan ketika tahun 2011. “Sekarang banyak pemilik kartu yang sudah meninggal, kawin, dan pindah,” tegasnya. Menurut Indra, kehadiran PIPA JKN, dapat membantu masyarakat, saat mereka tidak mendapat layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan.



Sahir S. Daeng Mahera,
Kepala Desa Batusuya

“Pengalaman saya mengakses kesehatan juga tidak menyenangkan, hingga istri saya meninggal,” kata Sahir.

DATA BERMASALAH

Sahir S. Daeng Mahera (59 tahun) baru diangkat sebagai Kepala Desa Batusuya sekitar 7 bulan lalu. Sama seperti Indra Jaya Yoce (Kepala Desa Batusuya Go'o), Sahir juga melihat banyak kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan. Data yang tidak sesuai menjadi kendala utama dalam pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Harusnya, saat pendataan ada kerjasama dengan saya, agar saya bisa menunjukkan kepada petugas yang mendata ini dusun satu dan ini kepala dusunnya, jadi datanya sesuai. Anehnya banyak yang tidak dapat kartu BPJS, tapi ada juga seorang dapat sampai 4 kartu, padahal masyarakat yang tidak mampu membayar biaya kesehatan, tidak mendapatkan kartu,” ungkapnya.

Kejadiannya bermula pada satu setengah tahun lalu, istri Sahir sedang menyiapkan barang jualannya untuk dibawa ke pasar, keluhan awal istrinya adalah sakit perut. Selanjutnya ketika Sahir mengecek ke kamar mandi tangan istrinya sudah kaku, “terkena stroke, kemudian saya dan anak saya mengangkatnya ke kamar. Sesampainya di tempat tidur

kakinya juga kaku, akhirnya kami bawa ke rumah sakit dengan ambulans. Itu ambulans juga saya harus bayar Rp 250.000,” jelas Sahir. “Sedihnya, nyawa istri saya tidak tertolong karena pembuluh darah sudah pecah,” lanjutnya.

Sahir menyatakan bahwa hingga sekarang Kartu Tanda Penduduk miliknya masih tertahan di rumah sakit karena dia tidak melunasi biaya saat istrinya di rumah sakit. Sahir pernah menyampaikan pendapatnya ketika ada pertemuan di kantor bupati mengenai permasalahan pelayanan kesehatan yang tak maksimal dan nepotisme dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. “Ketika ada keluarga saya masuk rumah sakit kemudian saya bilang saya punya keponakan yang jadi dokter di sana, kemudian pelayanan jadi cepat dan ruangan kamar tersedia, bagaimana dengan nasib masyarakat miskin yang tak punya kenalan orang dalam?” ceritanya. Sahir berharap, “agar semua pelayanan lebih baik saya rasa kita harus memperhatikan orang yang tidak mampu sesuai dengan tujuan dari presiden.”

ADA PERBEDAAN PERLAKUAN

Ulfa (32) adalah relawan PIPA JKN di Batusuya Go'o. Ia adalah anggota dari Kelompok Kepentingan Ibu Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia. Selama menjadi relawan PIPA JKN, ia menemukan bahwa ada perlakuan berbeda terhadap pasien pengguna KIS (Kartu Indonesia Sehat)

“Saya sebenarnya bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2005, tetapi aktif kembali pada 2015,” jelas Ulfa. “Saya sudah mengikuti Pendidikan Kader Dasar. Mengenai Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi di BP Batusuya Go'o,” kata Ulfa. Ia pun kemudian menjelaskan kegiatan PIPA JKN di Balai Perempuan Batusuya Go'o. “Kami sempat membantu masyarakat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat,” jelas Ulfa.

“Menurut Ulfa, pelayanan kesehatan di desanya bisa dibilang kurang baik, karena ada perbedaan perlakuan antara pemegang KIS dengan yang langsung membayar, contoh kasusnya ada masyarakat pemegang kartu KIS yang berobat ke puskesmas di atas jam 12.00 WITA maka harus membayar.”

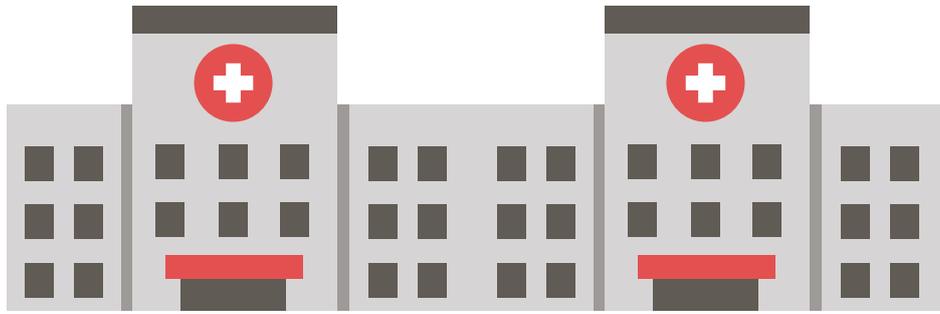
Ulfa kemudian menanyakan ke Puskesmas, mengapa pemegang KIS harus membayar jika memeriksakan kesehatan di atas pukul 12.00 WITA. Pihak puskesmas menjelaskan bahwa puskesmas hanya melayani pengguna KIS dari jam 08.00 – 12.00

WITA. Ulfa bersama relawan PIPA JKN pun akhirnya menanyakan kepada Dinas Kesehatan, tentang pembatasan jam pelayanan bagi pemegang KIS, saat ada pertemuan di Kecamatan. “Sayangnya pertanyaan ini, tidak terjawab karena ibu yang seharusnya menjawab rehat untuk sholat,” jelas Ulfa. Ulfa pun kemudian menceritakan rencana PIPA JKN, “rencana kami selanjutnya adalah membuat pertemuan lagi jadi ketika kami mau mengadvokasi Jaminan Kesehatan Nasional kami harus memegang dulu peraturan, jangan sampai ternyata peraturannya memang pengguna KIS hanya bisa berobat gratis pada pukul 08.00-12.00 WITA”.



Ulfa, BP Batusuya Go'o

“Menurut Ulfa, pelayanan kesehatan di desanya bisa dibilang kurang baik, karena ada perbedaan perlakuan antara pemegang KIS dengan yang langsung membayar, contoh kasusnya ada masyarakat pemegang kartu KIS yang berobat ke puskesmas di atas jam 12.00 WITA maka harus membayar.”



PIPA JKN BALAI PEREMPUAN PETOBO, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan

Fitriani adalah Dewan Kelompok Kepentingan Informal Cabang Kota Palu. Fitriani, biasa dipanggil Nani sudah bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia sejak 2009. Saat Balai Perempuan Petobo membentuk PIPA JKN, Nani terpilih sebagai Pengurus PIPA JKN.

Nani menuturkan, bahwa pengaduan tentang Kartu Jaminan Kesehatan, tidak hanya datang dari anggota Koalisi Perempuan Indonesia. Melainkan pengaduan juga datang dari masyarakat. Sebagian besar dari pengaduan yang diterima oleh pengurus Balai Perempuan Petobo berasal dari warga yang belum mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan terutama Kartu Indonesia Sehat yang disediakan untuk masyarakat yang tidak mampu membayar pelayanan kesehatan.



Fitriani, DKK Informal Cabang Palu

Melihat banyaknya pengaduan dari warga yang tidak mampu, yang tidak memperoleh KIS atau Kartu JKN, maka PIPA JKN pun menanyakan perihal pendataan tersebut kepada kepala desa. *"Ternyata yang melakukan pendataan untuk Kartu Indonesia Sehat itu bukan berasal dari kelurahan atau dinas kesehatan, katanya berasal dari Jakarta,"* jelas Fitriani

Bagi Nani, kehadiran PIPA JKN, sangat berguna bagi masyarakat di sekitar Balai Perempuan. Karena warga miskin yang selama ini tidak tahu harus mengadu kemana, kini mereka dapat mengadu ke PIPA JKN.

Menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia, membuat Fitriani mengalami perubahan dalam hidupnya. Ia kini diperhitungkan di desanya dan dipercaya mewakili desa untuk menghadiri berbagai kegiatan perempuan. *"Sebelum ikut Koalisi Perempuan, saya merasa tak dihargai, sekarang bahkan kelurahan sering memanggil saya untuk menjadi perwakilan datang ke acara perempuan,"* kata Fitriani.

Kegiatan-kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia dan kegiatan desa, dirasakan Fitriani sangat berguna untuk perkembangan pengetahuan dan rasa percaya dirinya. *"Pengalaman saya bertambah dan memotivasi saya untuk menjadi perempuan yang lebih mampu,"* kata Fitriani mengakhiri wawancara dengan redaksi Semai.

MEMPERJUANGKAN KIS UNTUK IBU HAMIL

Iram sudah bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia sejak bulan Agustus 2016 dan sudah mengikuti Pendidikan Kader Dasar. Menurutnya, mayoritas masyarakat di Petobo tidak tahu mengenai Jaminan Kesehatan Nasional.

Iram menuturkan bahwa jumlah anggota di Balai Perempuan Petobo mencapai 31 orang, “*meski banyak yang mau bergabung, tapi kami tahan karena target awalnya hanya 30 orang,*” tutur Iram. “*Ketika ada pertemuan rutin yang datang bisa 11 hingga 18 orang dan kami sudah rutin melakukan iuran sebanyak Rp2.000 per bulan,*” jelas Iram. Beragam permasalahan yang dibahas di Balai Perempuan Petobo antaranya mengenai Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak merata bagi warga miskin hingga kasus pernikahan dini. Iram juga menceritakan bahwa dari semua anggota Balai Perempuan hanya 11 orang yang memiliki kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

“*Kebanyakan dalam satu keluarga yang mendapat hanya suami dan anak, istri tidak. Rencana tindak lanjut kami adalah meminta data ke kelurahan, pendaftaran warga tidak mampu kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan-red). Seharusnya yang mendapat bantuan adalah orang yang tidak mampu, jangan sampai salah sasaran,*” jelas Iram.

Iram menuturkan pengalamannya yang paling berkesan saat menangani Pengaduan di PIPAJKN:

Kasus yang pernah saya tangani secara langsung adalah memperjuangkan akses kesehatan kepada ibu hamil yang bernama Olivia. Olivia merupakan salah satu anggota balai perempuan. Saat saya bantu usia kehamilannya sudah 5 bulan, kemudian saya bertanya kepada dia apakah dia sudah memeriksakan diri ke puskesmas, ternyata belum dan dia tidak memiliki buku. Saya ingat bahwa ibu hamil seharusnya mendapat imunisasi sebanyak dua kali, tetapi Olivia belum mendapatkan imunisasi sama sekali.

Pada hari Senin saya mengantarkan dia ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Sayangnya ketika sampai di puskesmas petugas menginformasikan bahwa Kartu Indonesia Sehat milik Olivia tidak lagi aktif karena dia termasuk dalam golongan mampu. Dari pihak puskesmas menjelaskan bahwa ada

petugas mereka yang sebelumnya melakukan pemeriksaan HIV AIDS dan Olivia terdata sebagai golongan mampu. Namun saya menjelaskan bahwa sewaktu itu rumah yang dilihat petugas adalah rumah mertua Olivia yang seorang petani, sedangkan Olivia hanya ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan yang belum tentu mendapat upah setiap minggu.

Pada hari kedua, saya ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersama Olivia dan ibunya untuk mengaktifkan kartunya. Kemudian kami menuju Puskesmas Bulili dan saya menginformasikan kepada bidan bahwa Olivia belum mendapat imunisasi. Akhirnya Olivia mendapat pelayanan kesehatan dan mendapatkan catatan kesehatan di buku Kesehatan Ibu dan Anak”.

Pengalaman memperjuangkan KIS yang cukup panjang ini, merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Kesadaran Iram tentang pentingnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, telah menggerakkannya untuk membantu Olivia.

Menurut Iram, dalam melakukan pergerakan bagi kemajuan perempuan, kondisi perempuan di Petobo tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, karena sulit untuk mengubah pemikiran perempuan mengenai kesehatan yang belum dianggap masalah yang penting.



Iram, DKK Perempuan Janda

MEMPERJUANGKAN KARTU INDONESIA PINTAR

Selain menjadi tempat pemberian informasi dan penerimaan pengaduan sekaligus advokasi Jaminan Kesehatan Nasional, PIPA JKN Balai Perempuan Petobo, juga menerima pengaduan tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penanganan pengaduan tentang KIP ini dilakukan, mengingat KIP juga merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, untuk mencegah anak dari keluarga tidak mampu mengalami putus sekolah.

Pengaduan tentang KIP yang masuk di PIPA JKN BP Petobo, umumnya tentang pendataan dan salah sasaran serta bantuan yang tidak kunjung turun.

Ani, pengurus PIPA JKN BP Petobo menuturkan *“selain mengenai Jaminan Kesehatan Nasional ada juga keluhan mengenai Kartu Indonesia Pintar. Ada keluarga tidak mampu dan anaknya tidak terdata untuk mendapat bantuan, sedangkan anak dari keluarga mampu justru mendapat dana”*.

Ani, yang telah bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia sejak Agustus 2016, langsung menindaklanjuti pengaduan tentang KIP. *“Saya sudah tanyakan ke pihak sekolah tentang masalah ini. Sekolah mengaku telah mengirim data secara online nama-nama pemegang KIP, tapi yang keluar justru nama anak-anak dari keluarga mampu yang tidak mendapat Kartu Indonesia Pintar. Pihak sekolah mengatakan bahwa perbaikan data masih diproses,”* jelas Ani.

Ia kemudian menyampaikan penjelasan kepala sekolah, bahwa menurut kepala sekolah, bantuan ini sudah tahap kesembilan, tapi dana yang keluar hanya dari tahap kedua dan sembilan. Bagi Ani, dana yang tidak keluar ini perlu diurus lebih lanjut. Ani mengkhawatirkan adanya nepotisme dalam pembagian KIP, sehingga anak yang dari keluarga tergolong mampu justru mendapat bantuan. Oleh karenanya PIPA JKN BP Petobo mengawal pembagian KIP agar tidak salah sasaran.

Ani juga memberikan penilaian tentang kemajuan pelayanan kesehatan di kelurahan. Menurutnya, pelayanan kesehatan tingkat kelurahan sudah baik. Ketika anak Ani sakit, diperiksa dengan baik dan pelayanannya ramah. Ada juga pelayanan kesehatan gratis seperti pemeriksaan TBC, kolesterol, gula darah. Untuk perempuan juga ada pemeriksaan HIV AIDS, kanker mulut rahim (serviks), dan kanker payudara secara gratis, sehingga sudah ada beberapa anggota balai perempuan yang ikut pemeriksaan gratis.

Ani juga menceritakan bahwa di Puskesmas Bulili juga disediakan kotak-kotak untuk penilaian pelayanan mereka mulai dari kotak puas, tidak puas, dan sangat puas.

Masih menurut Ani, masalah Jaminan Kesehatan Nasional terbanyak pada pendataan yang tak merata, ada masyarakat miskin yang belum dapat bantuan, untuk yang belum terdata PIPA JKN BP Petobo membantu dengan mengajukannya. PIPA JKN BP Petobo juga mengirim surat permohonan pada kelurahan agar dilibatkan juga dalam mendata masyarakat yang harus mendapat bantuan.



Ani, Anggota BP Petobo KK Perempuan Pekerja Rumah Tangga

“Ada tiga kasus yang terdata di PIPA JKN BP Petobo, mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP), terutama mengenai anak keluarga tidak mampu yang tidak memiliki KIP dan bantuan dana semester yang belum keluar.”

BISA OPERASI KISTA, KARENA PIPA JKN BP PETOBO

Nurhikmah, 17 tahun, pasien penderita kista di bagian perut yang berhasil mendapatkan pelayanan kesehatan dan operasi Kista, setelah didampingi oleh PIPA JKN BP Petobo.

Nurhikmah, awalnya hanya merasakan sakit perut. Namun sakit ini dianggap sakit biasa, dan didiamkan saja. Tidak diperiksakan ke puskesmas. Namun, selama sekitar satu tahun perutnya makin membesar dan sakit hingga muntah darah. saya cukup pergi ke puskesmas,” jelas Nurhikmah.

Saat PIPA JKN membuat kegiatan Konsultasi Publik. Nurhikmah berkonsultasi dengan Ani, Pengurus PIPA JKN. “Kemudian saya dibantu oleh Ibu Nani, beliau memberitahu bagaimana cara mendapat rujukan ke rumah sakit” kata Nurhikmah. “Akhirnya saya diantar ke puskesmas dan diberi rujukan ke rumah sakit dan akhirnya dioperasi. Ada masalah ketika sampai di rumah sakit, Kartu Indonesia Sehat saya hilang. Tapi



Nurhikmah, penerima manfaat PIPA JKN

diberi tahu bahwa saya boleh juga menggunakan Kartu JAMKESMAS, sehingga akhirnya saya tetap bisa operasi dengan gratis,” kenang Nurhikmah.

“Setelah dioperasi saya menginap di rumah sakit selama satu minggu, setelahnya saya diberi obat. Untuk melepas jahitan, rumah sakit merujuk kembali ke Puskesmas,” jelas Nurhikmah.

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT TERBANTU



Fitriani, Nurhasan (Lurah Petobo), Rembon Tangkelangi (Kasi Pemerintahan Kelurahan Petobo), Iram, dan Ani

Kehadiran PIPA JKN yang dikelola oleh Balai Perempuan Petobo diketahui oleh aparat kelurahan. Nurhasan, Lurah Petobo dan Rembon Tangkelangi, Kasi Pemerintahan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, menyampaikan penilaiannya dan memberikan apresiasi terhadap PIPA JKN BP Petobo.

“Saya sudah dua tahun menjadi lurah, yang saya tahu tentang Koalisi Perempuan Indonesia adalah mengenai kegiatan-kegiatannya sebagai wadah perempuan, bila ada pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan maka perempuan memiliki tempat untuk berlindung,” jelas Nurhasan.

Menurut Nurhasan, dengan adanya Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi (PIPA) kami sebagai pemerintah sangat mendukung karena dapat membantu pemerintah. Nurhasan juga merencanakan untuk menyelenggarakan pertemuan dengan Balai Perempuan Petobo. Pertemuan dengan pihak Kelurahan Petobo, memang sangat dinanti oleh pengurus Balai Perempuan Petobo. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan Kelurahan Petobo dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai Perempuan sebagai PIPA. “Tapi sayangnya, belum ada waktu, karena banyak rapat di Kota Palu, kami mohon maaf,” kata Nurhasan.

Menjawab permasalahan data dan JKN yang tidak tepat sasaran, Nurhasan menyatakan bahwa pihaknya sudah mulai mendata warga kurang mampu yang belum mendapat Jaminan Kesehatan Nasional. *“Ada kepala seksi yang bertugas untuk mendata dan saat ini sudah terkumpul 300 data, tapi masih dalam proses,”* jelas Nurhasan.

Kasi Pemerintahan Kelurahan Petobo, Rembon Tangkelangi baru mengetahui Koalisi Perempuan, setelah mengetahui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia.

“Saya mengetahui Koalisi Perempuan Indonesia memang baru-baru ini, sejak ada kegiatan konsultasi publik tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Saya tertarik pada kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia karena banyak informasi yang diberikan dari hasil pertemuan itu, banyak pengaduan tentang Jaminan Kesehatan Nasional.” jelasnya.

Salah satu masalah yang dibahas dalam konsultasi publik adalah antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan pelayanan dari Puskesmas. Terhadap masalah antrian yang panjang ini, beliau memiliki gagasan. *“Menurut saya untuk antrian panjang di puskesmas ada solusi yang bisa dilakukan, misalnya dengan memisahkan antrian antara yang mau mengambil rujukan dan antrian pelayanan kesehatan yang memang dapat ditangani langsung oleh puskesmas. Sehingga yang hanya mengambil rujukan dapat segera menuju rumah sakit agar masalah kesehatannya dapat ditangani, jangan sampai begitu sampai di rumah sakit sudah tutup. Jika orang sakit, lebih baik disuruh mengantri yang dipisahkan, sehingga tidak terlalu lama menunggu. Ini pengalaman pribadi yang saya lihat dan dari keluhan masyarakat,”* jelasnya.

Sebagai kasi pemerintahan, beliau juga menjelaskan bahwa anggaran untuk kesehatan yang melekat pada puskesmas. *“Anggaran kelurahan untuk kesehatan sebenarnya melekat pada puskesmas, contohnya untuk ibu hamil ketika berobat digratiskan,”* kata Rembon.

PIPA JKN BALAI PEREMPUAN SUNJU, Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi



“Komunikasi di rumah dengan suami dan kedua anak saya juga lebih baik, terutama setelah saya dikirim pelatihan. Saya bisa menjelaskan kepada suami saya, ketika saya dikirim untuk belajar dan dapat menjelaskan tentang Jaminan Kesehatan Nasional kepada dia setelah ikut pelatihan,” jelas Syarifah

Syarifah, Sekbal BP Sunju

Syarifah (31 tahun) adalah anggota Kelompok Kepentingan Ibu Rumah Tangga yang terpilih sebagai Sekretaris Balai Perempuan Sunju, yang berada di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Sebagai Sekretaris Balai Perempuan, Syarifah juga bertanggungjawab atas pengelolaan PIPA JKN. Banyak pengaduan yang masuk ke PIPA JKN Balai Perempuan Sunju. Sebagian masalah langsung ditangani, dan sebagian masalah lagi dibahas dalam pertemuan rutin BP, sekaligus menjadi rencana advokasi. Salah satu masalah yang langsung ditangani adalah pengaduan dari Ibu Regina yang tiba-tiba menerima tagihan dari puskesmas. *“Ada laporan mengenai pelayanan kesehatan, berhubungan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Laporan saya terima dari ibu Regina, keadaannya saat itu dia membawa anaknya yang sakit ke puskesmas, sudah sempat diinfus. Setelahnya, puskesmas menagih biaya kepada ibu Regina alasannya karena obat yang diberikan kepada anak ibu Regina adalah obat persediaan puskesmas dan tidak termasuk dalam pelayanan KIS”* jelas Syarifah. Balai Perempuan sudah mengadukan kasus ini kepada Dinas Kesehatan, *“seharusnya puskesmas menginformasikan dahulu mengenai obat-obatan yang akan digunakan kepada pasien, jangan tiba-tiba ada tagihan,”* jelas Syarifah lagi.

“Saya baru bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia sekitar satu tahun dan sudah mengikuti pelatihan advokasi di Bogor. Setelah bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia perubahan yang terjadi pada saya adalah banyak pengetahuan terutama tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang saya ketahui. Saya juga senang dapat membagi pengetahuan yang saya dapat setelah pelatihan kepada teman-teman di Balai Perempuan Sunju,” cerita Syarifah.

“Tak hanya itu, saya juga termotivasi melanjutkan kuliah di jurusan Pendidikan Guru Taman kanak-kanak (PGTK) dan sekarang dalam proses menyusun skripsi. Padahal saya sebelumnya pemalu, kurang berani bicara,” tambahnya.

Syarifah mengungkapkan bahwa kepercayaan dirinya terbangun ketika dia dipilih menjadi sekretaris balai. *“Komunikasi di rumah dengan suami dan kedua anak saya juga lebih baik, terutama setelah saya dikirim pelatihan. Saya bisa menjelaskan kepada suami saya, ketika saya dikirim untuk belajar dan dapat menjelaskan tentang Jaminan Kesehatan Nasional kepada dia setelah ikut pelatihan,”* jelas Syarifah sambil tersenyum lebar.

Syarifah menjelaskan, bahwa dirinya belum menggalakkan pembayaran iuran. Namun Balai Perempuan sudah mandiri menyelenggarakan pertemuan rutin, *“belum ada iuran di balai perempuan kami, sehingga kalau ada pertemuan rutin ada makanan itu dari saweran bersama”*. Dalam pertemuan rutin, biasanya yang hadir hanya 20 orang dan membahas tentang pelayanan kesehatan di Desa Sunju. *“Kami pernah membahas mengenai bidan dalam pertemuan rutin balai perempuan,”* tegasnya. Bidan desa yang bertugas tidak selalu ada di puskesmas sehingga kalau masyarakat akan berobat harus ke bidan lain dan tentunya membutuhkan biaya tambahan lain dan waktu yang lebih banyak. *“Terkait ketidaksediaan bidan, kami sudah berdiskusi dengan kepala desa, situasinya saya perhatikan sudah 3 kali bidan berganti, bahkan ada bidan yang bertugas tidak sampai 1 tahun,”* kata Syarifah.

Selain menerima pengaduan dari masyarakat, Balai Perempuan juga membahas akses layanan kesehatan bagi anggotanya. *“Sekarang jumlah anggota kami sekitar 40 orang, ada 14 orang yang belum mendapat kartu Jaminan Kesehatan Nasional,”* ungkap Syarifah sambil mengamati catatan yang dibuatnya.

Syarifah juga mengamati tentang pelayanan kesehatan di desanya. *“Setahu saya, pelayanan kesehatan khusus perempuan belum ada yang gratis, ada pelayanan gratis untuk masyarakat seperti pemeriksaan rabun mata dan gula darah,”* tambahnya.

BEKERJA SAMA DENGAN DESA, TKSK DAN BPJS



Suharni, Koordinator PIPA JKN

Suharni (45 tahun) adalah anggota Kelompok Kepentingan Petani yang bertugas di Balai Perempuan Sunju sebagai koordinator pengurus Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA JKN).

Banyak pengaduan yang masuk ke PIPA JKN Balai Perempuan Sunju. “Pengaduan yang paling banyak kami terima dan sedang diproses adalah tentang perbedaan data di Kartu Indonesia Sehat dengan data dan situasi masyarakat yang sebenarnya. Nama, tempat dan tanggal lahir di Kartu KIS, tidak sama dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP),” kata Suharni.

Perbedaan data pada KIS dengan KTP tentunya dapat menimbulkan masalah misalnya, ditolak puskesmas saat akan berobat atau memeriksakan kesehatan.

“Namun permasalahan ini belum diketahui oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Oleh karenanya, kami dari Balai Perempuan Sunju berkoordinasi dengan aparat desa serta TKSK dan BPJS,” jelas Suharni. Koordinasi dengan aparat Desa, TKSK dan BPJS akhirnya membuahkan hasil. Kepala Desa, TKSK dan BPJS menerima Balai Perempuan dengan baik. *“Jadi kalau ada data di kartu salah, kami dari Balai Perempuan dapat mengajukan koreksi data langsung ke kantor BPJS,”* jelas Suharni.

Suharni sudah bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia sejak 2009. *“Sebelum bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia, saya perempuan yang tidak mengerti permasalahan perempuan,”* kenangnya. Sejak menjadi anggota Suharni mengikuti berbagai pelatihan. *“Beberapa pelatihan sudah saya ikuti seperti pendidikan kader berjenjang, pelatihan advokasi, pelatihan pengorganisasian, hingga **Training of Trainer** Pendidikan Kader Dasar, dan lainnya”*.

Berbagai pelatihan yang diikuti, membantunya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya. Saat diselenggarakan Konferensi Cabang Sigi, Suharni terpilih sebagai Dewan Kelompok Kepentingan dari Kelompok Kepentingan Perempuan Petani. *“Saya sekarang juga terpilih sebagai Koordinator PIPA JKN,”* ujarnya dengan semangat.

Sebagai Koordinator PIPA JKN, ia bersama pengurus dan anggota Balai Perempuan, tak lelah memperjuangkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Baginya, permasalahan perempuan adalah permasalahan desa. *“Permasalahan di desa saya sekarang ini tentang bidan puskesmas desa kami, yang tidak siaga. Kami berharap mendapat bidan yang lebih perhatian kepada masyarakat,”* tegasnya mengakhiri wawancara dengan Redaksi

MENDUKUNG DAN MENGAPRESIASI BALAI PEREMPUAN

Mulyadi Mulyokana (46 tahun) adalah Sekretaris Desa Sunju. Sebagai aparat desa, beliau mengamati perkembangan Koalisi Perempuan Indonesia dan manfaatnya bagi pemerintah dan masyarakat.

“Sudah cukup lama saya tahu ada Koalisi Perempuan Indonesia di Desa Sunju tapi memang baru terlihat kegiatannya sejak menangani pengaduan tentang masalah kesehatan,” kata Mulyadi mengawali wawancara dengan Redaksi Semai. *“Sudah empat kali Koalisi Perempuan Indonesia mengundang kami untuk berdiskusi,”* tambahnya.

“Menurut saya Koalisi Perempuan Indonesia bermanfaat bagi perempuan terutama bidang kesehatan. Pengetahuan perempuan bertambah dari yang tidak tahu informasi sekarang menjadi tahu,” jelas Mulyadi. *“Kami atas nama pemerintahan desa mendukung dan mengapresiasi kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia dan semoga makin sering mengadakan sosialisasi informasi terutama di daerah terpencil seperti daerah kami,”* ungkap Mulyadi menanggapi pertanyaan Redaksi Semai tentang kegiatan Balai Perempuan di desa Sunju.

Menanggapi permasalahan bidang desa yang dikeluhkan oleh warga kepada PIPA JKN, Mulyadi menjelaskan bahwa saat ini sudah ada dua Bidan Desa. *“Ada dua yang siap di pusat kesehatan desa. Tapi masalahnya, yang desa belum punya adalah pusat kesehatan terpadu,”* jelasnya.

Menjawab tentang masalah jalan desa yang dikeluhkan masyarakat, Mulyadi sebagai sekretaris desa mengakui, bahwa jalan desa menjadi perhatian desa. *“Pembangunan jalan desa menjadi masalah utama yang sedang desa kami tangani, dana pembangunan jalan didapat dari pemerintah pusat, kabupaten, dan dana Desa Sunju,”* jelasnya.

“Total dana desa mencapai 600 juta rupiah yang digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Sudah ada anggaran kesehatan untuk desa untuk lanjut usia, perbaikan gizi balita, dan ibu hamil,” jelas Mulyadi. *“Pemeriksaan gratis untuk lanjut usia dan bagi yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat,”* tambahnya.

Mulyadi juga menjelaskan, bahwa menurut informasi dari Dinas Sosial di Desa Sunju, jumlah warga yang akan mendapat KIS sekitar 630 jiwa dan sudah dibagikan lebih dari 50% kepada masyarakat.



Mulyadi Mulyokana, Sekretaris Desa Sunju

“Menurut saya Koalisi Perempuan Indonesia bermanfaat bagi perempuan terutama bidang kesehatan. Pengetahuan perempuan bertambah dari yang tidak tahu informasi sekarang menjadi tahu,” jelas Mulyadi.

Liputan Seminar Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia

Jakarta – Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi mengadakan Seminar Pentingnya RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia pada 19 Januari 2017. Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Dian Kartikasari (Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia), Dra. Hj. Soemientarsi Muntoro M.Si, dan Hanifah Muyassarah.



SEKILAS PERJALANAN RUU KEADILAN & KESETARAN GENDER

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Pada tahun 2000 Presiden RI, Abdurrahman Wahid, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Evaluasi Implementasi Inpres PUG dilakukan pada tahun 2006, dan hasilnya menunjukkan bahwa Inpres PUG belum cukup kuat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Karena Inpres tersebut hanya mengikat eksekutif, tetapi tidak mengikat lembaga-lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif. Salah satu upaya untuk mendorong komitmen semua lembaga negara di tingkat nasional dan daerah menerapkan persepektif keadilan gender dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk memperkuat payung hukum Pengarusutamaan Gender, maka tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Serangkaian konsultasi telah diselenggarakan dan hasil akhir dari berbagai konsultasi menunjukkan bahwa RPP tidak akan berdampak signifikan untuk meningkatkan komitmen lembaga-lembaga negara dan dibutuhkan undang-undang sebagai payung hukum. Maka rancangan awal Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender beserta naskah akademik disusun pada 2009 dan dibahas hingga tahun 2010. Dokumen ini masih dalam proses penyempurnaan dan belum secara resmi diterbitkan oleh KPPPA.

DPR RI periode 2009 -2014, kemudian menjadikan RUU KKG sebagai RUU inisiatif. Draft RUU KKG selesai disusun pada Agustus 2011, dan dikonsultasikan ke berbagai pihak. Rapat Pleno Baleg DPR (3/9/2014) menyetujui Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) menjadi RUU Usul Inisiatif Komisi VIII, untuk kemudian diteruskan kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Dalam Rapat Pleno Baleg DPR tersebut enam fraksi (yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PPP) menerima RUU KKG dilanjutkan pembahasannya di Komisi VIII dan diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif Komisi VIII serta diteruskan ke Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Dua fraksi menolak RUU KKG (Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra) dan satu fraksi belum bisa menerima hasil harmonisasi RUU KKG. Keputusan ini hanya beberapa hari sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI periode (2009-2014).

INISIATIF MASYARAKAT SIPIL

Merespon perkembangan prolegnas tersebut, pada tahun 2015 masyarakat sipil kembali mendorong Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG). Diskusi di tingkat masyarakat sipil adalah untuk mengintegrasikan berbagai versi RUU yang sempat dirumuskan. Inisiatif masyarakat ini kemudian mendapat sambutan baik dari pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk menyempurnakan draft naskah akademik dan RUU KKG. Salah satu kemajuan berarti di tahun 2015 adalah dirumuskan draft 0 (nol) naskah akademik RUU KKG. Kerjasama masyarakat sipil dan pemerintah ini menunjukkan pentingnya RUU KKG di Indonesia, setidaknya dilihat dari aspek filosofis, yuridis, dan sosial-budaya.

Dari aspek filosofis, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan filosofis pentingnya UU KKG, terutama Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung makna bahwa keadilan belaku bagi setiap manusia

Dari aspek filosofis, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan filosofis pentingnya UU KKG, terutama Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung makna bahwa keadilan belaku bagi setiap manusia

Disamping itu, berlanjutnya praktek budaya yang mendiskriminasi dan bahkan membahayakan kehidupan perempuan dan anak perempuan serta anak laki-laki, seperti perkawinan anak, sunat perempuan, pengasapan perempuan paska melahirkan dan bayi baru lahir, budaya sifon*, dan beragam budaya lainnya yang merugikan perempuan dan anak. Tradisi ritual sifon adalah tradisi sunatan untuk laki-laki dewasa, biasanya untuk mereka yang sudah beristri dan punya anak, yang dalam proses penyembuhannya harus melakukan hubungan badan dengan perempuan tertentu yang bukan istri atau anggota keluarga dekat. Kebanyakan laki-laki menolak proses penyunatan sejak masa kanak-kanak, karena diyakini tidak sehat dan bisa menyebabkan impoten.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDGs) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 Tujuan (Goal) dan 169 sasaran (target). Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan, untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan 5 SDG tentang Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 9 target yaitu :

- 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun berada.
- 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia (trafficking) serta eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya
- 5.3 Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa serta sunat pada kaum perempuan
- 5.4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga, yang sesuai secara nasional
- 5.5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan memperoleh kesempatan yang sama terhadap kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat
- 5.6. Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi sebagaimana yang telah disepakati dalam Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan serta Landasan Beijing untuk Aksi dan dokumen hasil dari peninjauan konferensi
- 5.a. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan akses terhadap kepemilikan serta kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya, layanan finansial, warisan dan sumberdaya alam, sesuai dengan hukum nasional
- 5.b. Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan
- 5.c. Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas serta penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

Tujuan ke 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender yang tengah berjalan di Indonesia. Namun sayangnya proses legislasi RUU KKG di DPR justru terhenti sejak dilantiknya DPR periode 2014-2019. Meskipun RUU KKG tercantum dalam Prolegnas 2015-2019, namun selama tahun 2015 hingga akhir 2016 tidak ada pembahasan tentang RUU KKG di tingkat pemerintah maupun di tingkat DPR. Bahkan dalam daftar Prolegnas prioritas tahun 2017, RUU KKG tidak ada diantara 49 RUU yang akan dibahas oleh DPR.



Women's March Jakarta 2017 Menuju 8 Maret : Wujudkan 8 Tuntutan Perempuan Indonesia untuk Peradaban yang Setara

Menuju Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, juga sebagai bentuk solidaritas internasional *Women's March*, anggota Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat ikut berpartisipasi dalam acara Women's March Jakarta yang diadakan pada tanggal 4 Maret 2017. Pawai perempuan ini juga diikuti oleh individu, kelompok diskusi feminis, mahasiswa, anak muda, aktivis, pekerja swasta dan pekerja seni. Women March atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Pawai Perempuan merupakan sebuah gerakan yang terjadi di beberapa kota di seluruh dunia untuk mempromosikan hak perempuan.



Tergerak dari kekerasan berbasis gender yang menjadi persoalan pelik di Indonesia. Saat ini kekerasan berbasis gender telah menyebar di berbagai ranah kehidupan, baik ranah domestik maupun ranah publik. Sebut saja kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, kekerasan sosial ekonomi, praktik tradisional seperti sunat perempuan yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, stigma tentang keperawanan perempuan yang menghambat perempuan mengakses pendidikan, sikap penegak hukum dan pejabat publik yang bias gender, kesempatan berpolitik yang belum setara.

Meskipun laki-laki dapat juga menjadi korban kekerasan, tetapi korban terbesar tetap saja perempuan. Pada 2016, BPS dan KPPPA mencatat bahwa 2,27 juta perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setiap hari. Laporan kekerasan terhadap perempuan yang kami kutip dari 232 lembaga mitra yang datanya diolah dari data Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama menyebutkan bahwa terdapat 305.535 kasus, sedangkan lembaga layanan mencatat telah terjadi 16.217 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pawai perempuan ini juga disampaikan mengenai **Delapan Tuntutan Perempuan Indonesia untuk Peradaban yang Setara:**

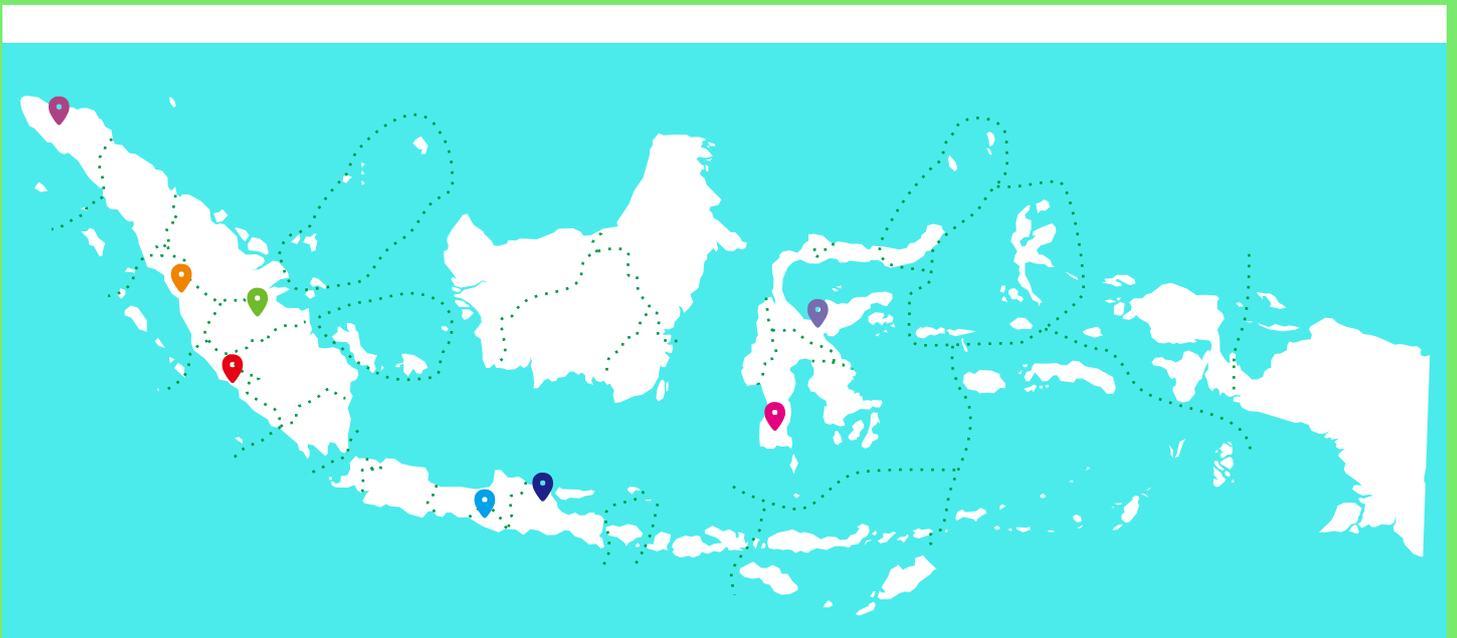
- I. Menuntut pemerintah membangun kembali masyarakat yang toleran dan menghormati keberagaman, sehingga dapat menekan semua tindak kekerasan atau pelanggaran HAM. Pemerintah dan pemimpin negara harus membangun kesadaran pentingnya toleransi dan penghormatan pada keberagaman baik kepada minoritas atau kelompok marjinal baik itu berdasarkan suku, ras, agama, orientasi seksual dan lainnya sebagaimana dimandatkan dalam Konstitusi Indonesia yang non diskriminasi.
- II. Menuntut Pemerintah untuk membangun infrastruktur hukum dan kebijakan yang pro-keadilan gender, dengan mensahkan RUU Anti-Kekerasan Seksual, RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Buruh Migran dan menolak upaya judicial review perubahan KUHP terkait pasal zina yang merugikan perempuan. Diwujudkan peraturan dan kebijakan yang berperspektif gender akan membantu pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan hak dan keadilan kondisi perempuan Indonesia dan keberhasilan Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
- III. Menuntut pemerintah aktif dan komprehensif dalam merencanakan program dan anggaran untuk kesehatan perempuan, pengurangan kekerasan berbasis gender dan pemenuhan hak perempuan dengan mendukung penghapusan pernikahan anak, penurunan angka kematian Ibu melahirkan dengan perbaikan fasilitas dan pendidikan kesehatan reproduksi yang terjangkau bagi perempuan; serta mendukung penghapusan sunat perempuan.



- IV. Menuntut pemerintah dan mengajak masyarakat untuk memperhatikan isu lingkungan hidup, perubahan iklim, dan kaitannya pada hak-hak pekerja perempuan. Alih fungsi lahan dan konflik terkait eksploitasi sumber daya alam, karena investasi semakin meminggirkan perempuan dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam. Perempuan ditempatkan sebagai pekerja ditengah kondisi yang terpapar perubahan iklim yang mempercepat kerusakan alam dan tidak terjaminnya hak perempuan pada upah yang layak dan layanan kesehatan yang memadai di perusahaan/ sektor Industri.
- V. Menuntut pemerintah membangun kebijakan dan pelayanan publik yang pro pada perempuan dan warga negara berkebutuhan khusus (disabilitas). Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan di publik maupun di ruang kerja. Keberpihakan kebijakan pemerintah dan etika perusahaan yang berperspektif gender akan mendukung suasana kerja yang lebih kondusif serta melawan pelecehan seksual/kekerasan seksual di dalam kantor.
- VI. Menuntut partai politik dan pejabat negara untuk memperhatikan hak politik perempuan,dengan mendukung perubahan dalam Revisi UU Penyelenggaraan Pemilu dan RUU Partai politik dengan mendukung keterwakilan perempuan minimal 30% di setiap Dapil, Menempatkan perempuan dalam posisi strategis dalam Struktur Partai Politik dan melakukan kaderisasi dan proses rekrutmen calon legislatif, eksekutif maupun pengurus partai secara setara. Di eksekutif menuntut pemerintah untuk meningkatkan kaderisasi dengan menempatkan lebih banyak perempuan pada jabatan strategis melalui seleksi yang adil dan setara gender.
- VII. Menuntut pemerintah dan mengajak masyarakat untuk melakukan penghormatan terhadap keberagaman, penghargaan dan hak-hak seksualitas kelompok dengan orientasi seksual berbeda yang budaya dan keberadaannya sudah ada sejak zaman dulu, sesuai UU HAM dan UUD 1945—bahwa masyarakat bebas berorganisasi dan bermasyarakat sesuai hak-hak warga negara yang dilindungi hukum. Semua tindakan kekerasan dan diskriminasi berarti melanggar konstitusi.
- VIII. Mengajak masyarakat luas untuk peduli pada isu perempuan dan dampak kebijakan internasional kepada hak-hak perempuan. Hal ini terkait solidaritas perempuan kepada isu perempuan internasional. Warga Negara Indonesia harus menunjukkan solidaritas dan keberpihakan pada perlawanan atas pelanggaran yang terjadi, baik terkait isu fasisme, intoleransi, diskriminasi berbasis SARA, juga sentimen atau opini publik terhadap imigran. Solidaritas ini dibangun jaringan kerja *Women's March Global* yang bersama membangun kesepahaman dan diskursus publik soal hak-hak perempuan dan keadilan gender.

PIPA JKN

**Wilayah yang memiliki Balai Perempuan sebagai
Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi
Jaminan Kesehatan Nasional**



**ACEH | SUMATERA BARAT | JAMBI | BENGKULU | DI YOGYAKARTA |
JAWA TIMUR | SULAWESI SELATAN | SULAWESI TENGAH |**

